

BAB II

FNKSDA DAN STRATEGI GERAKAN

A. Profil Nahdlatul ulama'

1. Sejarah Nahdlatul Ulama'

Nahdlatul Ulama lahir pada tanggal 31 Januari 1926 sebagai representatif dari ulama tradisional, dengan haluan ideologi *Ahlu Sunnah wal-Jama'ah* tokoh-tokoh yang ikut berperan diantaranya K.H. Hasyim Asy'ari, K.H. Wahab Hasbullah, K.H. Bisri Syansuri dan para ulama pada masa itu saat kegiatan reformasi mulai berkembang luas, ulama belum begitu terorganisasi namun mereka sudah saling mempunyai hubungan yang sangat kuat. Perayaan pesta seperti *haul*, ulang tahun wafatnya seorang kiai, secara berkala mengumpulkan para kiai, masyarakat sekitar ataupun para bekas murid pesantren mereka yang kini tersebar luas diseluruh nusantara.¹

Nahdlatul Ulama (NU) sejak kelahirannya merupakan wadah perjuangan untuk menentang segala bentuk penjajahan dan merebut kemerdekaan negara Republik Indonesia dari penjajah Belanda dan Jepang, sekaligus aktif melakukan dakwah-dakwahnya untuk senantiasa menjaga kesatuan negara Republik Indonesia dalam wadah NKRI. Bagaimana NU dalam peranannya yang begitu besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, mempertahankan ke-utuhan NKRI dapat dilihat atas latar belakang lahirnya ormas terbesar di dunia Nahdlatul Ulama (NU).

¹Masykur Hasyim, *Merakit Negeri Berserakan*, (Surabaya: Yayasan 95, 2002), h. 66

Paling tidak ada tiga alasan besar yang melatarbelakangi lahirnya Nahdlatul Ulama 31 Januari 1926, yaitu *Pertama*, motif agama. *Kedua*, motif mempertahankan paham *Ahlu al-Sunnah wal-Jama'ah*, dan *ketiga*, motif nasionalisme.²

Kalangan pesantren yang gigih melawan kolonialisme dengan membentuk organisasi pergerakan, seperti Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air) pada tahun 1916. Kemudian tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri (Kebangkitan Pemikiran), sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Selanjutnya didirikanlah Nahdlatul Tujjar, (Pergerakan Kaum Sudagar) yang dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujjar itu, maka Taswirul Afkar, selain tampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota.

Sementara itu, keterbelakangan, baik secara mental, maupun ekonomi yang dialami bangsa Indonesia, akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi, menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini, melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul 1908 tersebut dikenal

²Motif nasionalisme adalah diantara tiga motif lahirnya NU, diantaranya yaitu *Pertama*, Motif agama karena Nahdlatul Ulama lahir atas semangat menegakkan dan mempertahankan Agama Allah SWT di Nusantara, meneruskan perjuangan Walisongo. Terlebih Belanda-Portugal tidak hanya menjajah Nusantara, tapi juga menyebarkan agama Kristen-Katolik dengan sangat gencarnya. Mereka membawa para misionaris-misionaris Kristiani ke berbagai wilayah. *Kedua*, motif mempertahankan paham *Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah*, karena NU lahir untuk membentengi umat Islam khususnya di Indonesia agar tetap teguh pada ajaran Islam *Ahlu al-sunnah wa al-Jamā'ah* (Para Pengikut Sunnah Nabi, Sahabat dan Ulama Salaf Pengikut Nabi-Sahabat), sehingga tidak tergiur dengan ajaran-ajaran baru yang tidak dikenal pada zaman Rasul-Sahabat-Salafus Shaleh/ajaran ahli *bid'ah* yaitu pembawa ajaran-ajaran *bid'ah* yang sesat (*bid'ah madzmumah*). Lihat, Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU* (Surabaya: Bisma Satu Press, 1998), h. 36.

dengan Kebangkitan Nasional. Semangat kebangkitan memang terus menyebar ke mana-mana—setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain, sebagai jawabannya, muncullah berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan.

Ketika Raja Ibnu Saud hendak menerapkan asas tunggal yakni mazhab wahabi di Mekah, serta hendak menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam maupun pra-Islam, yang selama ini banyak dizarahi karena dianggap bi'dah. Gagasan kaum wahabi tersebut mendapat sambutan hangat dari kaum modernis di Indonesia, baik kalangan Muhammadiyah di bawah pimpinan Ahmad Dahlan, maupun PSII di bawah pimpinan H.O.S. Tjokroaminoto. Sebaliknya, kalangan pesantren yang selama ini membela keberagaman, menolak pembatasan bermadzhab dan penghancuran warisan peradaban tersebut.

Sikapnya yang berbeda, kalangan pesantren dikeluarkan dari anggota Kongres Al Islam di Yogyakarta 1925, akibatnya kalangan pesantren juga tidak dilibatkan sebagai delegasi dalam Mu'tamar 'Alam Islami (Kongres Islam Internasional) di Mekah yang akan mengesahkan keputusan tersebut.

Didorong oleh minatnya yang gigih untuk menciptakan kebebasan bermadzhab serta peduli terhadap pelestarian warisan peradaban, maka kalangan pesantren terpaksa membuat delegasi sendiri yang dinamai dengan Komite Hejaz, yang diketuai oleh KH. Wahab Hasbullah.

Atas desakan kalangan pesantren yang terhimpun dalam Komite Hejaz, dan tantangan dari segala penjuru umat Islam di dunia, Raja Ibnu Saud mengurungkan

niatnya. Hasilnya hingga saat ini di Mekah bebas dilaksanakan ibadah sesuai dengan madzhab mereka masing-masing. Itulah peran internasional kalangan pesantren pertama, yang berhasil memperjuangkan kebebasan bermadzhab dan berhasil menyelamatkan peninggalan sejarah serta peradaban yang sangat berharga.

Berangkat dari komite dan berbagai organisasi yang bersifat embrional dan ad hoc, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis, untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah berkordinasi dengan berbagai kiai, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926). Organisasi ini dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar.

Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka KH. Hasyim Asy'ari merumuskan Kitab Qanun Asasi (prinsip dasar), kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam Khittah NU, yang dijadikan dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik.³

2. Latar Belakang Sosial-Budaya Nahdlatul Ulama'

Sosial-Budaya NU yang dimaksud tingkah laku (behavior), kebiasaan, dan aturan-aturan tidak tertulis yang dipegang teguh oleh para kiai NU, baik dalam kehidupan berorganisasi maupun bermasyarakat sebagai konsekuensi dari

³ *Sejarah Nahdlatul Ulama' dalam www.NU.or.id*

ajaran Islam yang dipelajari dan diajarkannya. Dalam konteks ini, tradisi, meminjam beberapa variabel yang digunakan sebagai kompleksitas ide, gagasan, nilai-nilai, moral dan peraturan wujud ideal dari kebudayaan yang sifatnya abstrak yang lokasinya terletak dalam alam pikiran manusia warga masyarakat.⁴

Tradisi menghormati dan menempatkan kedudukan ulama' yang dianggap paling senior pada posisi paling atas secara tidak disadari telah dirintis jauh sebelum lahirnya NU. Tradisi semacam itu sangat memungkinkan terpeliharannya kekompakan, keutuhan dan terhapusnya ancaman, perpecahan, serta kemungkinan rebutan kedudukan. Misalnya, khusus jabatan Rais Am (jabatan tertinggi dilingkungan NU).

Jelas bahwa aturan tidak tertulis yang diberlakukan bagi penempatan seorang Rais Am memerlukan beberapa persyaratan, antara lain:

- a.) ulama' yang paling masyhur, paling dalam ilmu agamanya, tingi derajat kemuliaannya, dan paling sepuh usiannya,
- b.) ulama' yang memimpin pondok pesantren,
- c.) ulama' yang tidak ambisius, tetapi tidak menolak tanggung jawab. Inilah salah satu tradisi yang menjadi kekuatan NU.⁵

Manusia adalah tradisi pembacaan sejarah (tarikh) Rasulullah saw, sahabat dan ahli baitnya, serta diselingi pujian kepada mereka, shalawat dan do'a. Adapun merayakannya tiap bulan Rabi'ul Awal, yakni bulan kelahirannya adalah bertujuan

⁴ Ali Anwar, "ADVONTURISME" NU, (Bandung: Humaniora Utama Press (HUP), 2014), hlm.134

⁵ *Ibid.* Hlm. 135

memperlithatkan cinta kepada beliau dibulan kelahiranya. Dan yang paling fundamental adalah dapat menambah rasa cinta kepada Rasulullah dan diharapkan mendapat syafa'atnya kelak dihari kiamat.⁶

Para ulama' NU memandang peringatan Maulid Nabi ini sebagai bid'ah (perbuatan yang dizaman Nabi tidak ada) namun, termasuk bid'ah hasanah (bid'ah yang baik) yang diperbolehkan Islam. Banyak amalan seorang Muslim yang dizaman nabi tidak ada dan sekarang dilakukan umat Islam, antara lain: berzanjenan, diba'an, yasinan, tahlilan (bacaan tahlilnya tidak bid'ah, sebab Rasulullah sendiri sering membacannya), mau'izah hasanah pada acara temanten dan muludan.⁷

Budaya lokal tidak bisa saja ditolak tatkala kita membicarakan perkembangan Islam di Indonesia sudah tidak lagi murni Islam, tetapi sudah berubah menjadi Islam budaya. Menurut mereka Islam adalah Islam dan budaya adalah budaya dan keduanya tidak bisa disatukan atau dicampur adukan. Dan mudah saja kita tebak, mereka akan menunjuk budaya selametan atau kenduri sebagai contoh yang terlarang, mencampur adukkan Islam dengan budaya. Islam dengan versi mereka akan terlihat kaku dan sama sekali tidak fleksibel.

NU sebagai ormas Islam tradisional yang fleksibel dengan prinsip dan semangat dakwah dengan hikmah yang menerima budaya tidak bisa saja di cap sesat atau dianggap sebagai penolong tradisi Jahiliyyah seperti yang dituduhkan orang-orang bodoh yang sok ahli tauhid was-sunnah.

⁶ Nurhidayat Muhammad, *Ibid.* hlm. 50

⁷ Munawir Abdul Fattah. *Ibid.* hlm. 231

Sejarah diterimanya kehadiran Islam di Nusantara dengan kondisi keagamaan masyarakat yang menganut paham animisme (Hindu-Budha), tidak bisa dilepaskan dari cara dan model pendekatan dakwah para mubaligh Islam kala itu yang ramah dan bersedia menghargai kearifan budaya dan tradisi lokal. Sebuah pendekatan dakwah yang terbuka dan tidak antisipati terdapat nilai-nilai normatif di luar Islam, melainkan mengakulturasikannya dengan membenahi penyimpangan-penyimpangan di dalamnya memasukkan ruh-ruh keIslaman ke dalam substansinya. Maka lumrah jika kemudian corak amaliah ritualitas muslim Nusantara (khususnya Jawa) hari ini, kita saksikan begitu kental diwarnai dengan tradisi dan budaya khas lokal, seperti ritual selamatan, kenduri, dan lain-lain.

Amaliah keagamaan seperti itu tetap dipertahankan karena kaum Nahdliyyin meyakini bahwa ritual-ritual dan amaliyah yang bercorak lokal tersebut. Hanyalah sebatas teknis atau bentuk luaran saja, sedangkan yang menjadi substansi didalamnya murni ajaran-ajaran Islam. Dengan kata lain, ritual-ritual yang bercorak tradisi lokal hanyalah bungkus luar, sedangkan isinya adalah nilai-nilai ibadah yang dianjurkan oleh Islam.

Dalam pandangan kaum Nahdliyyin, kehadiran Islam yang dibawa oleh Rasulullah saw. Bukanlah untuk menolak segala tradisi yang mengakar menjadi kultur budaya masyarakat, melainkan sekedar untuk melakukan pembenahan-pembenahan dan pelurusan-pelurusan terhadap tradisi dan budaya yang tidak sesuai dengan risalah Rasulullah saw. Budaya yang telah mapan menjadi nilai normatif masyarakat dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam akan mengakulturasikannya

bahkan mengakuinya sebagai bagian dari budaya dan tradisi Islam itu sendiri.

Dalam hal ini, Rasulullah saw. Bersabda:

“ apa yang dilihat orang Muslim baik, maka hal itu baik disisi Allah.” (HR. Malik).

Kendati demikian, amaliah dan ritual keagamaan kaum Nahdliyin seperti itu, sering mengobsesi sebagian pihak untuk menganggapnya sebagai praktik-praktik sengkritisme, mitisme, khurafat, bid'ah bahkan syirik. Anggapan demikian sebenarnya lebih merupakan subyektifitas akibat terjebak dalam pemahaman Islam yang sempit dan dangkal serta tidak benar-benar memahami hakikat amaliah dan ritual-ritual hukum Nahdliyyin tersebut. Pihak-pihak yang seperti ini, wajar apabila kemudian dengan mudah melontarkan 'tuduhan' bid'ah atau syirik terhadap amaliah dan ritualitas kaum Nahdliyyin, seperti ritual tahlilan, peringatan Maulid Nabi, Istighfar, Pembacaan berzanji, Manaqib, Ziarah kubur, dan amaliah-amaliah lainnya.

Mayoritas umat Islam Indonesia, bahkan di dunia adalah penganut Aliran Ahlussunnah Wal Jamaah. Ajaran-ajaran Ahlussunnah Wal Jama'ah begitu berakar dan membumi dalam tradisi, budaya, dan kehidupan keseharian masyarakat muslim Indonesia. Memang ajaran-ajaran Aswaja bisa terwujud dalam manifestasi yang beragam diberbagai belahan dunia Islam karena cara hidup, kebiasaan, dan adat istiadat masing-masing kawasan dunia Islam yang berbeda. Namun, ada benang merah yang menyatukan semua adat-adat yang berbeda itu. Ajaran Aswaja selalu menjiwai berbagai tradisi-tradisi tersebut. Pasti ada ajaran-ajaran Aswaja yang menjadi substansi dan penggeraknya. Bagi para Ulama' dan kalangan terpelajar akan

dengan mudah menangkap ajaran-ajaran dibalik tradisi-tradisi keagamaan yang berbeda-beda tersebut. Namun, bagi sebagian kalangan awam mungkin agak sulit, mereka lebih memahami praktek dari pada aspek bathiniyyahnya. Dari sinilah timbul kesalah pahaman terhadap sebagian tradisi-tradisi keagamaan yang ada⁸.

Selama ini kita maklum, bahwa sebelum hadirnya dakwah Islam yang diusung para wali (walisongo), masyarakat Jawa adalah pemeluk taat agama Hindu dan juga pelaku budaya Jawa yang kental dengan nuansa Hinduisme sampai sekarang masih di-ugemi (pedomani) sebagian masyarakat Indonesia.⁹

Mengikis budaya yang tidak sejalan dengan ajaran agama dan sudah mengakar kuat, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh perjuangan yang ekstra keras tentunya. Sebagian dari mereka memilih jalan dakwah dengan langsung mengajarkan dan menerapkan syari'at Islam kepada masyarakat. Budaya dan praktek syirik yang tak sejalan dengan syari'at Islam langsung dibabat habis. Dan ada pula yang menggunakan pendekatan sosial budaya dengan cara yang lebih halus: dengan cara mengalir mengikuti tradisi masyarakat tanpa harus terhanyut.

Perbedaan jalan dakwah seperti itu tidak perlu diperdebatkan karena semuanya muncul dari cita-cita luhur mengIslamkan masyarakat yang masih memeluk agama nenek moyang yang sarat dengan syirik, kufur, dan penuh nuansa takhayul dan khurafat.

⁸ Abu Abdillah, *Argumen Ahlussunnah Wal Jamaah*, (Tangerang Selatan: Pustaka Ta'awun, 2011).cet.II. Hal V.

⁹ Nurhidayat Muhammad, *Lebih Dalam Tentang NU*, (Surabay: Bina Aswaja,2012). Cet. I. hal 2.

Menurut cerita sejarah, budaya mengadakan kenduri atau selamatan kematian yang juga merupakan budaya mereka tidak serta merta beliau hapus. Budaya selamatan yang semula dipenuhi dengan ajaran kufur, wadahnya dibiarkan, tetapi isinya yang sarat dengan kekufuran dan cid'ah diganti dengan ajaran yang bernuansa Islami, atau minimal jauh dari kemusyrikan.¹⁰

Mengenai tuduhan tasyabbuh (menyerupai) dengan orang kafir dalam budaya lokal dilestarikan walisongo tersebut, tentu dengan mudah kami dapat mendebat. Upacara ala Hindu dalam selamatan hari kematian, misalnya, seperti hari ke-7, ke-40, ke-100 dan lain-lain sama sekali telah diganti dengan sedekah karena Allah, membawa Al-Qur'an, shalawat, dzikir, dan do'a.

Budaya lokal tidak bisa saja ditolak tatkala kita membicarakan perkembangan Islam di Indonesia. Hal ini terkait dengan bantahan sebagian kelompok, bahwa Islam di Indonesia sudah tidak lagi murni, tetapi sudah berubah menjadi Islam budaya. Menurut mereka Islam adalah Islam dan budaya adalah budaya dan keduanya tidak bisa disatukan atau dicampuradukkan.¹¹

Istilah "*nahdliyin*" menunjuk pada para pengamal paham Ahlussunnah wal Jama'ah yang diidentifikasi kepada umat Islam yang tergabung dalam NU, komunitas muslim yang umumnya terbentuk dalam proses sejarah Islam Indonesia yang terkonsentrasi di pedesaan. Selain itu, mereka lekat dengan budaya Jawa, budaya yang di dalamnya orang-orang NU lahir dan NU sendiri berasal dari pulau

¹⁰ *Ibid.* hal 3.

¹¹ Nurhidayat Muhammad., *Ibid.*, hal 14.

Jawa. Akar sejarah yang seperti inilah yang melahirkan pemotretan social adanya kerapatan, bahkan tak terpisahkan antara budaya Jawa dan eksistensi kaum nahdliyin.

Sikap kaum nahdliyin mampu menyesuaikan antara agama dan budaya Jawa, khususnya dan budaya bangsa Indonesia pada umumnya. Itulah sebabnya, kaum nahdliyin sangat akrab dengan budaya lokal dan mempunyai tradisi yang sangat kuat untuk menjalankan syari'at Islam. Cara yang ditempuh NU dalam menghadapi budaya lokal adalah kompromi, tidak bersikap destruktif, tetapi sedapat mungkin membiarkannya tetap hidup dimasyarakat sambil mengisinya dengan jiwa dan semangat Islam. Inilah yang menjadi salah satu sumber kekuatan NU sehingga lahirnya NU tidak berhadapan dengan budaya lokal masyarakat, bahkan mampu menyatukan aspirasi kebudayaan dengan aspirasi keIslaman.

NU menyadari, bahkan meyakini, bahwa apresiasinya yang tinggi terhadap kebudayaan yang ada di tengah masyarakat tidak sampai masuk dalam kategori bid'ah, khurafat dan syirik. Misalnya, peringatan kematian hari pertama, ketiga, ketujuh, keseratus, keseribu hingga haul. Jika memang bid'ah, namanya adalah bid'ah kebudayaan. Bid'ah jenis ini justru merupakan keharusan.

Kemampuan NU mendudukan kebudayaan secara proporsional dan yang seharusnya telah menempatkan NU sebagai orgnisasi yang concern dalam pemeliharaan tradisi Islam di Indonesia. Kekuatan ini bukan hanya terletak pada pola pikir tradisionalnya, melainkan juga karena NU bertolak pada khadim al-ummah. Implikasinya, NU lebih populis di tengah-tengah kehidupan masyarakat, tanpa berkonfrontasi dengan mereka. Kerapatan dan kedekatan NU dengan kebudayaan

lokal memposisikan eksistensi NU didukung oleh berbagai kelompok social dan aliran seperti kaum abangan, bahkan non-Islam. Tradisi tahlilan misalnya, di daerah-daerah minus agama yang terkadang diikuti oleh orang-orang yang beragama Hindhu atau Budha. Ini terjadi karena sikap NU yang selalu mengakomodasi tradisi masyarakat dan berusaha menghindari sikap konfrontatif yang karenanya terjadi jarak dengan masyarakat, apalagi menyerang tradisi mereka.

Upaya pembaharuan yang dilakukan NU adalah mengambil hal baru yang lebih baik. Jadi, NU berada di tengah-tengah antara tradisi lama dan budaya baru yang lebih baik. Sikap tengah-tengah (*wasathan*) ini merupakan bukti nyata bahwa NU berupaya membangun wacana baru dan khas dibandingkan organisasi lain dalam upaya merespons arus modernisasi. Karena itu, dapat dikatakan bahwa di dalam tubuh NU ditemukan akar proses persemaian tentang tumbuhnya neomodernisasi yang dialami NU. Ketika organisasi Islam lainnya bermusuhan dengan tradisi lokal guna mengikuti irama kemodernan, NU justru berusaha melindunginya, lalu menjadi organisasi yang berkarakter melindungi tradisi.¹²

Dan berikut ini contoh beberapa budaya yang ditolerir dan diterima dalam Islam:¹³

- a) Budaya melumuri bayi dengan minyak za'faran saat aqiqah pada hari ketujuh dan mencukur rambut bayi sebenarnya adalah budaya Arab

¹² Ali Anwar, *Ibid*, hal 116-118.

¹³ Nurhidayat Muhammad, *Ibid.*, hal 15.

Jahiliyah dan ahli kitab yang ditetapkan dalam Islam. Hanya saja sebelum Islam kepala sang bayi dilumuri dengan darah hewan aqiqah.¹⁴

- b) Mengadakan haflah (resepsi) pernikahan, memainkan musik, dan menghias pengantin juga merupakan budaya Jahiliyyah yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW saat menikahkan putrinya juga membuat haflah dan menghiasnya.
- c) Penyerahan pengantin, baik pria atau wanita, dengan nasehat-nasehat yang baik juga budaya sebelum Islam yang masih dilakukan dalam Islam.
- d) Melamar wanita untuk dinikahi juga budaya Jahiliyyah yang ditetapkan Rasulullah SAW dalam Islam.
- e) Menyerahkan mahar nikah juga budaya Jahiliyyah yang ditetapkan Islam.
- f) Puasa Asyura yang dahulunya dilakukan oleh orang Yahudi Madinah. Alasannya pada tanggal itu Allah SWT menyelamatkan Nabi Musa dari serbuan tentara Fir'aun. Dan saat itu Rasulullah SAW datang ke Madinah, maka beliau merasa lebih berhak atas puasa tersebut.¹⁵
- g) Penghitungan kalender Masehi dimulai sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi, dan penanggalan tersebut tetap diperbolehkan dalam Islam sampai sekarang.
- h) Bulan Hijriyah yang berjumlah 12 juga diambil dari nama yang dibuat oleh orang Arab sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi.

¹⁴ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Tuhfatul-Maudud bi Ahkamil-Maulud*, (Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, tth), hal 33.

¹⁵ Muhammad al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (hadits no: 2004)

- i) Nama Asyhurul-Hurum (Bulan-bulan yang dimuliakan: Rajab, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, dan Muharam) diambil dari nama dan keyakinan orang Arab sebelum Islam dan faktanya diterima Islam.¹⁶
- j) Budaya syair-syair Arab Jahiliyyah tetap digunakan dalam Islam. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Abbas dalam menafsiri ayat al-Qur'an tatkala menemui kesulitan arti lafazh-nya, beliau merujuk syair-syair Arab Jahiliyyah.
- k) Haul, yaitu upacara peringatan ulang tahun wafatnya seseorang (terutama tokoh agama Islam), dengan berbagai acara, yang puncaknya menziarahi kubur al-marhum atau al-marhumah. Tradisi ini sudah berlaku bagi semua kalangan, tidak terbatas pada orang-orang NU saja, tetapi berlaku pula pada komunitas masyarakat lainnya, sekalipun bukan muslim.¹⁷
- l) Tradisi tahlilan. Berkumpul untuk melakukan tahlilan merupakan tradisi yang telah diamalkan secara turun temurun oleh mayoritas umat Islam Indonesia. Meskipun format acaranya tidak diajarkan secara langsung oleh Rasulullah SAW, namun kegiatan tersebut dibolehkan karena tidak satu pun unsur-unsur yang terdapat di dalamnya bertentangan dengan ajaran Islam, misalnya pembacaan surat Yasin, tahlil, tahmid, tasbih, dan semacamnya.¹⁸

¹⁶ Abu Bakar Syatha, *I'alah at-Thalibin* (Bairut: Darul Fikr, 1993), hal 307.

¹⁷ Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimiy, *Ternyata Aku Orang NU*, (Surabaya: Darul Hikmah, 2008), cet. I, hal 27.

¹⁸ Muhyiddin Abdusshomad, *Hujjah NU*, (Surabaya: Khalista, 2010), cet. IV, hlm. 95

- m) Perjamuan makanan dalam acara tahlilan. Dalam setiap pelaksanaan tahlilan, tuan rumah memberikan makanan kepada orang-orang yang mengikuti tahlilan. Selain sebagai sedekah yang pahalanya diberikan kepada orang yang telah meninggal dunia, motivasi tuan rumah adalah sebagai penghormatan kepada para tamu yang turut mendoakan keluarga yang meninggal dunia.¹⁹
- n) Tawassul, yaitu memohon datangnya suatu kemanfaatan atau terhindarnya bahaya kepada Allah dengan menyebut nama Nabi atau Wali untuk menghormati keduanya.²⁰ Jadi tawassul adalah sebab syar'i yang menyebabkan dikabulkannya permohonan seorang hamba. Tawassul dengan para Nabi dan Wali diperbolehkan baik saat mereka masih hidup atau sudah meninggal. Karena seorang mukmin yang bertawassul keyakinannya adalah bahwa tidak ada yang menciptakan manfaat dan mendatangkan bahaya secara hakiki kecuali Allah. Para Nabi dan para Wali tidak lain hanyalah sebab dikabulkannya permohonan hamba karena kemuliaan dan ketinggian derajat mereka.²¹
- o) Selamatan hari ke-3, 7, 40, 100, untuk orang yang meninggal, dalam realitas sosial, ditemukan adanya tradisi masyarakat Jawa, jika ada keluarga yang meninggal, malam harinya banyak sekali para tamu yang

¹⁹ *Ibid.* hal 98

²⁰ Ibnu Katsir, Abu Al-Fida'iy Isma'il bin Umar, *Tafsir al-Qur'an al-'Adhim*, Juz: II, (Beirut: Maktabah Dar al-Fikr, 1987), hal. 50

²¹ Abu Abdillah, *Argumen Ahlul-sunnah Waj Jama'ah*, (Jakarta: Pustaka Ta'awun, 2011), cet. II, hal 46

bersilaturrehman, baik tetangga dekat maupun jauh. Hal tersebut berlaku bagi kaum NU sampai pada hari ke-7, 40, 100, sebab di samping bersiap menerima tamu, sanak keluarga, handai tolan, dan kerabat dekat, mereka mengadakan do'a bersama melalui bacaan-bacaan kalimat thayyibah, seperti bacaan Yasin, tahlil, tahmid, istighatsah dan diakhiri dengan membaca do'a yang dikirimkan kepada yang sudah meninggal dunia.²²

- p) *Manaqib*, yaitu membaca kisah cerita tentang orang sholeh, seperti kisah Nabi atau Waliyullah, misalnya saja membaca *Manaqib* syekh Abdul Qadir al-Jilaniy dan sebagainya. Tradisi membaca *manaqib* tersebut, biasanya dilakukan oleh masyarakat yang berfaham Ahlussunnah wal Jama'ah, khususnya kaum NU dan biasanya dibaca pada malam jum'ah atau ketika ada hajatan khusus.²³

Dari contoh-contoh di atas menunjukkan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang fleksibel terhadap tradisi dan budaya. Dan itu semua merupakan dalil yang dipakai NU bahwa Islam menerima budaya selama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam.

B. Post Tradisionalisme Kaum Muda Nahdlatul Ulama'

Sejak berdirinya Nahdlatul Ulama' hingga saat ini, pasti kita akan sering menemui dan mendengarkan pandangan *stereotype* tentang NU yang tradisional,

²² Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimiy. *Ibid.*, hal 130

²³ *Ibid.* hal. 149-150.

kelompok ormas konservatif, kelompok yang berpegang teguh pada mazhab tertentu, kaum bersarung, kentalnya dengan budaya local, wong *ndeso* dan segudang pandangan negatif lain. Pandangan miring tersebut muncul dari budaya yang banyak diketahui dan berasal dari berbagai literatur yang sudah terdokumentasikan baik secara ilmiah maupun yang non ilmiah. Meski demikian, hal-hal yang memberikan *cap* terhadap NU patut kita apresiasi sebagai produk sosial dan budaya tetapi dengan menitikberatkan kepada konteks zaman kapan hal-hal tersebut muncul

Secara historis, munculnya istilah *Islam Tradisional* yang dipakaikan kepada NU merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri. Pandangan tersebut didasarkan kepada *pertama*, latar belakang warga NU yang begitu kentalnya dengan kearifan lokal. *Kedua*, kesalahan memandang perkembangan Islam itu sendiri, yakni pengabaian beberapa kelompok terhadap kemungkinan terhadap proses perkembangan pemikiran didalam tubuh NU. Terlebih dalam perkembangannya telah terjadi banyak pergeseran corak berpikir selama kurang lebih 2 dekade terakhir. Dengan munculnya fenomena gerakan pembaharuan Islam yang hampir tidak pernah terjadi dalam sejarahnya, sebuah gerakan pembaharuan Islam yang dimotori anak muda NU.

Munculnya gerakan pembaharuan tersebut menawarkan pemikiran baru sebagai respon terhadap pemikiran lama sehingga terjadi perubahan paradigma berfikir dalam NU, istilah tersebut lebih dikenal dengan post tradisionalisme. Post tradisionalisme merupakan suatu istilah gerakan wacana yang coba digagas oleh kalangan muda NU dengan mendasarkan pada ide-ide yang digagas oleh KH.

Abdurrahman Wahid sebagai lokomotif gerakan intelektualnya, dan secara epistemologis mereka mendasarkan pada tokoh-tokoh pembebasan seperti Mohammad Arkoun, Hasan Hanafi, Nasr Hamid Abu Zayd dan Abid Al-jabiri, maka dengan wacana-wacana tentang pembebasan terhadap kuasa teks dan tradisi. Gerakan ini juga lebih menitik beratkan pada gerakan-gerakan Intelektual organik dengan menciptakan jejaring-jejaring NGO, LSM dan Ormas yang memiliki kedekatan secara ideologis dengan NU sebagai media mengkampanyekan ide dan gagasannya tentang Post tradisionalisme itu sendiri.

Walaupun sampai hari ini wacana post tradisionalisme masih selalu menjadi perdebatan panjang terkait dengan kerangka-kerangka batasan makna epistemologisnya, pada satu sisi post tradisionalisme dianggap tidak lazim karena makna post tradisionalisme sendiri bisa diartikan sebagai melampaui menggugat, mencampakkan dan meninggalkan tradisi itu sendiri yang seakan-akan menantang semangat tradisional, atau jangan-jangan post tradisionalisme hadir hanya demi untuk menegaskan identitas tradisional kelompok muda NU yang terdidik saja, semakin dalam ditelisik semakin banyak memunculkan pertanyaan yang mencurigakan terkait dengan munculnya Post tradisionalisme itu sendiri, tapi setidaknya munculnya Post tradisionalisme tidak hanya dilatarbelakangi pergulatan wacana intelektual antara kaum tradisional dan modernisme, disisi lain kelahiran post tradisionalisme memang sebagai hasil pergulatan panjang dari proses transformasi intelektual dengan kesadaran kritis transformatif, yang mana Post tradisionalisme sendiri tidak

berpretensi untuk membangun metodologi dalam memahami Islam tapi lebih pada pemberian bingkai nalar kritis dalam memandang bangunan ortodoksi keagamaan.

Setidaknya ada beberapa hal yang melatarbelakangi dan menjadikan landasan semangat lahirnya post tradisionalisme, pertama terjadinya kejumudan (kemandegan berfikir) dalam konteks pemikiran beragama, hal ini tidak bisa dipungkiri dengan adanya satu doktrin dengan menempatkan Islam sebagai realitas wahyu sehingga melahirkan satu paradigma kemapanan bahwa Islam adalah agama wahyu yang kebenarannya menjad satu hal yang mutlak tak terbantahkan yang kemudian memunculkan satu kekhawatiran untuk merusak agama dan akidah, hal ini senada dengan apa yang diungkapkan Moh Arkoun dalam tulisannya *Naqd Al-Islam* bahwa ciri dan karakter Islam pada waktu itu:²⁴

1. Tunduk pada wahyu dan ortodoksinya,
2. Penghormatan pada otoritas dan keagungannya (Imam Mazhab dalam konteks Fiqih, Teologi dan Tasawuf),
3. Cara pandang tertentu atas epistemologi abad pertengahan terhadap alam semesta.

Berangkat dari wacana diatas yang kemudian menyebabkan kemandekan dalam konteks nalar berfikir masyarakat Islam, yang kemudian memunculkan tokoh-tokoh pemikir seperti Mohammad Arkoun, Hasan Hanafi dan Abid Al-jabiri Nasr Abu Zayd yang mencoba mendekonstruksi dan kemudian merekonstruksi

²⁴ Najib Burhani, <http://nu1926.blogspot.co.id/2010/08/post-tradisionalisme-sebagai-alternatif.html> diakses pada 20 Mei 2017

berbagai bentuk dan pola struktur kemapanan dengan otokritik terhadap teks-teks ajaran agama, yang mana mereka juga tidak terlepas dari pengaruh tokoh-tokoh post modernisme dan madzhab kritis yang juga hidup dalam belantika pemikiran barat pada waktu itu.²⁵

Kalangan muda NU beberapa tahun terakhir mempunyai kesadaran kritis akan eksistensi NU terhadap pola perubahan zaman, sehingga mereka memandang perlu adanya suatu gerakan pembaruan terhadap kultur NU yang selama ini melekat. Gerakan pembaruan ini meliputi tiga hal. Pertama, tentang masalah kemandegan berfikir (jumud). Realitas yang terjadi bahwa ternyata perubahan zaman semakin cepat terjadi dari hari ke hari, sehingga memaksa kalangan muda NU untuk berpikir ulang terhadap pola pemikiran yang diadopsi oleh NU. Pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat yang hanya bersandar pada teks-teks tradisional (kitab kuning) dirasa oleh kalangan muda NU tidak lagi mampu berbicara banyak terhadap realitas yang terus berkembang saat ini, perlu ada suatu rumusan baru mengenai pemecahan masalah tersebut. Sehingga menurut mereka, perumusan metode baru (ijtihad) perlu dilakukan untuk keluar dari kungkungan kejumudan yang selama ini melekat di NU.

Kedua, partisipasi NU dalam dunia politik praktis. Terjerumusya NU dalam dunia politik praktis banyak menyebabkan tujuan NU sebagai organisasi sosial keagamaan yang berorientasi pada pengembangan potensi ummat terbengkalai. Dari kondisi inilah, kalangan muda NU prihatin terhadap terjerumusya NU dalam

²⁵ *Ibid, Najib Burhani*

pusaran politik praktis dan mereka mencoba untuk menggeser gerakan politik praktis NU ini ke gerakan Islam kultural, sebagaimana misi awal pendirian organisasi ini. Ketiga, permasalahan pengelolaan keorganisasian. Pola hubungan patron-client yang kuat antara ulama dengan masyarakat, dimana ulama berperan sebagai patron dan masyarakat berperan sebagai client, menjadikan organisasi ini lemah dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Pengelolaan NU yang lebih bersifat tradisional perlu diganti dengan sistem yang lebih modern, karena basis massa yang sangat besar akan sulit menunjukkan eksistensinya jika hanya dikelola dengan pola-pola tradisional.

Pemahaman dalam beragama bagi kalangan NU seringkali berpijak dan berangkat dari teks yang sangat disakralkan dan teks mempunyai otoritas yang tinggi dikarenakan model pemahaman yang ada di NU selalu merujuk pada kitab-kitab ulama terdahulu. *Bahtsul masa'il* merupakan salah satu contoh betapa teks sangat dijunjung tinggi dalam model pemahaman dalam organisasi ini.

Tradisi dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai dua arti yaitu adat kebiasaan turun temurun yang masih dijalankan masyarakat dan penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar. Sedangkan penjelasan Muhammad Abid Al-Jabiri tentang tradisi terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Tradisi maknawi (al-turats al-maknawi), yang berupa tradisi pemikiran dan budaya,

- b. Tradisi material (al-turats al-ma'adi), seperti monumen dan benda-benda masa lalu,
- c. Tradisi kebudayaan, yaitu segala sesuatu yang kita miliki dari masa lalu kita,
- d. Tradisi kemanusiaan universal, yakni segala sesuatu yang hadir di tengah kita, namun berasal dari masa lalu orang lain.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata tradisional diartikan sebagai sikap, cara berpikir, dan bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan secara turun temurun. Islam tradisional seperti yang ada di Indonesia mempunyai ciri-ciri seperti berikut: pertama, sangat terikat dengan pemikiran Islam tradisional, yaitu pemikiran Islam yang masih terikat kuat dengan pikiran ulama ahli fiqh, hadits, tasawuf, tafsir, dan tauhid yang hidup antara abad ke tujuh hingga abad ke tiga belas. Kedua, kebanyakan basis massa dari penganut tradisionalisme Islam tinggal pada wilayah pedesaan dengan latar belakang pendidikan pesantren. Ketiga, keterikatan mereka pada paham ahlussunah wal jama'ah. Jika tradisional dapat diartikan sebagai sikap, cara berpikir, dan bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan secara turun temurun, maka tradisionalisme dapat diartikan dengan paham atau ajaran yang didasarkan atas tradisi.

Jika kita kaitkan dengan Islam, maka tradisionalisme Islam dapat diartikan sebagai praktik-praktik keagamaan maupun pemikiran dalam Islam yang dilakukan masyarakat secara turun temurun. Sedangkan post-tradisionalisme secara etimologi bisa diartikan pasca tradisionalisme. Meskipun kata post disini bisa diartikan dengan menggugat, melampaui, melewati dan bahkan meninggalkan tradisi, tetapi yang

menjadi inti dari post tradisionalisme disini adalah mentransformasikan dan merevitalisasi terhadap tradisi, bukan untuk meninggalkan tradisi. Maka demikian, dalam diri postradisionalisme terkandung nilai-nilai kontinuitas dan perubahan.

C. FNKSDA dan Strategi Gerakan

1. Siluet Sejarah FNKSDA

Imbas revolusi industri abad ke-17 semakin mendorong eksploitasi manusia terhadap sumber daya alam. Penemuan teknologi dan industri alat berat lainnya mendorong manusia untuk mengeksploitasi sumber daya alam semakin besar sebagai akibat dari logika kapitalisme. Logika kapitalisme mewajibkan para pelaku ekonomi untuk menghasilkan produk dengan jumlah massal serta harga yang murah. Industrialisasi sebagai wujud dari kapitalisme membutuhkan bahan baku yang murah, terjangkau, teknologi terbaru dan buruh dengan upah murah. Dengan demikian proses akumulasi modal dapat berlangsung terus menerus. Proses dominasi terhadap alam semesta semakin meluas ketika para ahli di negara-negara maju mengalami revolusi teknologi. Teknologi navigasi misalnya, teknologi ini memungkinkan aktor ekonomi untuk melakukan ekspedisi dan eksplorasi sumber daya alam yang belum diketahui sebelumnya. Penemuan tersebut menstimulus munculnya pabrik-pabrik raksasa di dalam ekosistem alam.

Berakhirnya era kolonialisme, dunia memasuki era “neo kolonialime” dominasi dan penjajahan tidak lagi bersifat fisik dan secara langsung melainkan penjajahan tidak lagi bersifat fisik dan secara politik dan ideologi. Periode ini

ditandai dengan masa kemerdekaan negara-negara dunia ketiga khususnya, Asia dan Afrika. Namun, era ini tidak terlepas dari dominasi negara-negara penjajah terhadap bekas koloni mereka. Mereka tetap melanggengkan dominasi mereka melalui kontrol terhadap teori dan proses politik yang terjadi.²⁶

Di era ini pula kapitalisme lahir dengan berbagai paham dan teori terkait model pembangunan ekonomi baru. Negara-negara pusat kapitalis seperti Amerika dan Uni Eropa mencoba membangun sistem ekonomi kapitalis di negara Dunia Ketiga. Untuk itu, kapitalisme melakukan *grand designs* strategi ekonomi-politik global untuk mempercepat akumulasi capital. Strategi tersebut diantaranya menyingkirkan rintangan investasi dengan pasar bebas, perlindungan hak milik intelektual, *good governance*, deregulasi serta penguatan *civil society*²⁷ Kondisi tersebut yang mendorong adanya liberalisasi serta globalisasi di negara dunia ketiga.

Menurut kelompok penganut neoliberalisme, pertumbuhan ekonomi akan dicapai maksimal jika terjadi “kompetisi bebas” antar pelaku ekonomi. Kompetisi yang agresif adalah akibat kepercayaan bahwa “pasar bebas” itu efisien untuk mengalokasikan sumber daya alam rakyat yang langka untuk memenuhi kebutuhan manusia. Harga barang dan jasa selanjutnya menjadi indikator apakah SDA sudah habis atau masih tersedia banyak. Ketika harga barang murah maka barang tersebut langka dipasaran dan sebaliknya. Oleh sebab itu, orang akan menanamkan modalnya ketika harga barang tersebut tinggi. Kesimpulannya,

²⁶ Mansour Fakih, “*Jalan Lain, Manifesto Intelektual Organik*” (Yogyakarta:Pustaka Pelajar.2002).hal. 184

²⁷ *Ibid.*, Mansour Fakih. 2002.,,.,hal. 187

harga jadi tanda apa yang harus di produksi.

Posisi negara harusnya lebih superior dari pada pasar. Negara berhak mengatur serta menetapkan regulasi terkait pengelolaan SDA-nya sendiri. Selain itu, melakukan setiap kontrol terhadap perusahaan nasional maupun transnasional yang berproduksi di wilayah negara. Di Indonesia misalnya, kondisi itu sudah tercantum dalam amanat Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*". Aturan dasar negara tersebut seharusnya menjadi acuan prinsip model pembangunan di Indonesia. Penguasaan swasta terhadap sumber daya alam Indonesia harus dibatasi.

Namun, yang terjadi adalah Indonesia sebagai dunia ketiga juga memiliki sejarah yang erat dengan model ekonomi kapitalisme. Puncaknya, ketika keran liberalisasi ekonomi di buka lebar pada masa Orde Baru. Karena pada masa kepemimpinan Soeharto Indonesia mulai mengikuti sistem demokrasi liberal. Izin pertambangan yang sebelumnya susah diperoleh kapitalis pada masa Orde Lama justru dipermudah pada masa Orde Baru. Hal ini berimplikasi pada munculnya banyak perusahaan tambang raksasa yang tumbuh pesat pada masa itu. Sumber hukum yang menjadi landasan gagasan arah pembangunan tersebut dipublis pada tahun 1966 melalui TAP MPRS No. XXIII/MPRS/1966.

Implikasinya, sektor swasta mendapat keluaasaan untuk mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia. Sektor-sektor strategis seperti migas, pertambangan, bank, manufaktur dikuasai sepenuhnya oleh korporasi multinasional asing.

Akibatnya, perusahaan Indonesia bangkrut, karena tidak memiliki daya saing yang kuat. Terjadi ketimpangan sosial-ekonomi yang luar biasa akibat konglomerasi, kepemilikan tunggal. Terlebih sektor industri kecil-menengah dan pertanian nantinya akan semakin terpuruk. Jurang ketimpangan semakin menganga, yang kaya akan semakin melanjutkan dominasi kekayaannya dan masyarakat miskin akan semakin terpuruk.

Persoalan jalan paradigma ekonomi yang dipilih oleh pemerintahan Orba memiliki dampak resiko yang berkelanjutan hingga era sekarang. Era revormasi masih dibayang-bayangi oleh utang luar negeri serta ketidakberdayaan iklim dunia usaha di Indonesia. Para Konglomerat produk pembangunan Orde Baru justru di era sekarang justru menguasai panggung politik, ekonomi dan media di Indonesia.²⁸

Hebert Marcuse dalam (Situmorang, 2007) mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat produksi sebuah pabrik maka semakin bertambah beban kerusakan yang harus ditanggung oleh alam, termasuk manusia di dalamnya. Produksi yang sangat besar hanya akan menguntungkan kaum pemodal yang apatis terhadap rusaknya ekosistem. Selain itu, kondisi tersebut menjadikan watak masyarakat semakin konsumtif terhadap alam. Kebijakan ini ditindaklanjuti dengan menerapkan politik membuka kran sebesar-besarnya untuk investor asing. Negara sengaja mengakomodasi kepentingan investor asing dalam aspek keamanan asset

²⁸ Dawam Raharjo, *"Pembangunan Pasca Modernis : Esai-esai ekonomi politik"* (Yogyakarta:2011. Pustaka Pelajar). Hal 32-36.

investasi melalui penerapan sistem predatoris yang ditopang oleh birokrasi politik. Kapitalisme baru ini yang berimplikasi pada kesenjangan sosial dan rusaknya ekosistem lingkungan hidup di Indonesia.²⁹

Sentralisasi pengelolaan sumber daya alam oleh negara dan swasta berdampak pada gerakan sosial-lingkungan masyarakat sipil yang menentang dominasi mereka. Dominasi negara dan pasar memunculkan beberapa konflik sosial. Konflik terjadi antara masyarakat dengan swasta maupun negara dengan masyarakat. Konflik ini muncul akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap distribusi kesejahteraan yang hanya dikuasai oleh segelintir orang. Disamping itu, konflik muncul akibat perbedaan kepentingan pengelolaan dan eksploitasi sumber daya alam antara masyarakat dan swasta. Pemanfaatan sumber daya alam yang dulunya *collective goods* akibat intervensi negara menjadi *private goods*. Selain itu, rusaknya ekosistem alam tempat tinggal masyarakat lokal akibat model pembangunan yang merusak alam.

Dalam konteks inilah membahas organisasi masyarakat sipil terutama lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak dalam isu kedaulatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Organisasi tersebut memiliki relevansi yang kuat karena melalui mereka perdebatan pembangunan berkelanjutan dan ramah dengan alam diperdebatkan. Mereka mencoba berafiliasi dengan barisan LSM lain yang bergerak dengan permasalahan dan kepentingan yang sama. Hal

²⁹ Erwin Edaryanta, *Politik Air di Indonesia : "Sejarah Si Gedhang oleh Korporasi Aqua Danone"*. (Yogyakarta: 2007. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM), hal 42.

ini memungkinkan mereka untuk agen produksi dan reproduksi wacana lingkungan dan pembangunan. Konteks sekarang ini di Indonesia sebagian besar elit politik dan pengambilan kebijakan kurang mempertimbangkan dampak sosial-ekologis. Kalaupun itu disadari, rekayasa penanggulangan dan usaha pencegahan sebagai wujud pengalihan isu. Kondisi tersebut yang menjadikan masyarakat lokal menjadi bergejolak untuk melakukan serangan fisik terhadap perusahaan pengelola SDA di wilayah mereka.³⁰

Konflik sumberdaya alam dan agraria sepanjang tiga tahun terakhir menyita perhatian publik mengingat intensitas ledakannya yang cukup sering. Ada tren yang cukup kuat, konflik yang dulu bersifat laten berubah menjadi manifest. Perbedaan sistem penguasaan lahan antar pihak dalam konflik agraria tak kunjung ada kepastian. Masyarakat gigih mempertahankan hak penguasaannya secara turun-temurun dan bersifat informal, sementara perusahaan dan para pihak lain datang dengan sistem aturan formal yang tidak dikenal dalam aturan yang berlaku di masyarakat.

Sejak kemunculannya di era 1970-an, sebagai respon atas kebijakan pembangunan Orde Baru, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia telah menjadi pelopor dalam melahirkan wacana-wacana alternatif hubungan antara manusia dan lingkungan. Selain mencoba mengeksploitasi alam wacana ini mendorong agar negara, swasta maupun masyarakat sipil peduli terhadap masa

³⁰ Nanang Kurniawan, "Wacana Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia" Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UGM. 2012 vol 16.

depan kehidupan ekologis manusia. Data empirik menunjukkan bahwa LSM lingkungan hidup bergerak tidak dalam alur wacana tunggal. Fragmentasi wacana lingkungan terjadi sangat kuat dan dipengaruhi relasi organisasi-organisasi tersebut dengan kekuatan global melalui skema kerjasama program dan pembiayaan maupun jejaring pengetahuan.³¹

Peran gerakan sosial terhadap transformasi sosial di masyarakat menjadi sesuatu yang tidak terelakkan. Gelombang gerakan sosial tersebut terus menerus diproduksi dan mengalami dinamikanya sendiri. Salah satu diantara banyak faktor yang menjadikan gelombang gerakan sosial tidak pernah surut adalah protes-protes berkaitan dengan kontestasi merebutkan Sumber Daya Alam (SDA). Salah satu aktor gerakan sosial tersebut adalah Organisasi Front Nahdliyin Untuk Kedulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA). Organisasi tersebut sebagian besar anggotanya adalah pemuda dan memiliki basis dengan warga Nahdliyin. Penelitian ini mencoba mendeskripsikan dan menganalisis secara sosiologis gerakan sosial yang dilakukan oleh FNKSDA.

Sejauh yang kita ketahui bahwa mayoritas penduduk Indonesia bergantung hajat hidupnya sebagai seorang petani. NU sebagai ormas terbesar di Indonesia memiliki 120 Juta Anggota,³² tentunya memiliki tanggung jawab dalam mengawal kesejahteraan mereka. Sebagai ormas terbesar, mayoritas dari warga NU sendiri adalah warga pedesaan yang bermata pencaharian sebagai petani. NU yang

³¹ *Ibid.*, *Jurnal Nanang kurniawan...*, hal 7-9.

³²<http://regional.kompas.com/read/2016/04/07/14013651/Buktikan.Klaim.sebagai.Ormas.Terbesar.NU.Terbitkan.Kartu.Anggota.Nasional> diakses pada 21 Mei 2017

seharusnya menjadi pelindung warganya seakan tidak memiliki gairah menyuarakan hak-hak untuk mendapatkan kedaulatan warganya. Kedaulatan akan kesejahteraan yang didambakan tidak sesuai dengan realitas dimana ketidakberdayaan petani didepan pasar. Bahkan pencaplokan lahan oleh kapitalisme ekstraktif semakin menyensarakan akibat ketidakberdayaan petani melawan neoliberalisme pasar.

Ketidakberdayaan Negara dan NU dalam hadapan kapitalisme ekstraktif membuat semakin terpuruknya kesejahteraan hidup masyarakat bawah dan semakin leluasa pelaku kapitalisme mengerogoti SDA Indonesia yang menjadi hak dari warga negara. Jika mengingat UUD 1945 dalam pasal 33 sesungguhnya negara merupakan hak primordial yang harus didapatkan bangsanya. Meminjam teori *Antonio Gramsci* kekuatan *basic superstruktur* (ekonomi) menentukan *basic suprastruktur* (sosial, politik dan budaya). Menurut Gramsci *hegemoni*³³ merupakan alat untuk memalnggengkan kekuasaan tanpa disadari, dengan menggunakan kekuatan modal kapitalisme ekstraktif menjadikan media, penguasa negara bahkan ulama' sebagai "alat hegemoni". Sebagai negara ketiga atau kategorisasi negara berkembang tentunya kemajuan sangat dinilai aspek ekonomi sektor pembangunan.

Gerakan sosial-lingkungan oleh kelompok pemuda muncul dalam tubuh ormas Islam Nahdlatul Ulama. Kondisi defisit kedaulatan sumber daya alam di Indonesia mendorong sekelompok pemuda NU membangun organisasi gerakan

³³ suatu kekuasaan atau dominasi atas nilai-nilai kehidupan, norma, maupun kebudayaan sekelompok masyarakat yang akhirnya berubah menjadi doktrin terhadap kelompok masyarakat lainnya dimana kelompok yang didominasi tersebut secara sadar mengikutinya. Kelompok yang didominasi oleh kelompok lain (penguasa) tidak merasa ditindas dan merasa itu sebagai hal yang seharusnya terjadi

sosial-lingkungan yang berbasis jaringan dengan komunitas Nahdlatul Ulama. Organisasi tersebut yaitu Front Nahdliyin Untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) yang resmi berdiri pada 9 Desember 2013. Awalnya FNKSDA muncul akibat dari kekecewaan sebagian pemuda NU terhadap kelompok NU struktural. Sebab, kelompok elit NU yang duduk struktural dianggap kurang peduli terhadap isu kedaulatan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan-sosial hidup rakyat Indonesia, khususnya warga NU. Pemerintah dan kelompok NU struktural menurut FNKSDA kurang bertanggung jawab terhadap kedaulatan SDA serta dampak sosial-lingkungan yang ditimbulkan (Sobirin dalam Daulathijau.org, 2013)

Adapun isi dari deklarasi 08-09 Desember 2013 di Jombang sebagai berikut:
Rapat besar Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) pada 8 Desember 2013 di Tebuireng Jombang.

Mendengar:

Betapa besarnya hasrat ummat Islam dan alim ulama di setiap daerah di Indonesia untuk mempertahankan dan menegakkan agama dan kedaulatan negara Republik Indonesia merdeka.

Menimbang:

- a. Bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan kedaulatan Republik Indonesia merdeka menurut hukum Agama Islam, termasuk sebagai suatu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam.
- b. Bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari Ummat Islam.

- c. Bahwa Republik Indonesia yang berdaulat berdasar Pancasila dan UUD 1945 telah dipertahankan oleh darah para ulama dan pejuang Islam yang telah gugur.
- d. Bahwa tujuan negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 memerintahkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang dijiwai oleh Pancasila.
- e. Bahwa salah satu cara untuk mencapai tujuan negara sebagaimana dalam pembukaan Konstitusi ialah dengan jalan penguasaan cabang-cabang produksi penting bagi negara serta bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Mengingat:

- a. Bahwa oleh karena kapitalisme ekstraktif asing dan lokal yang datang dan berada di Indonesia telah banyak sekali menjalankan penguasaan dan perampasan sumber daya alam sehingga terjadi banyak kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.
- b. Bahwa yang dilakukan kapitalisme ekstraktif telah melanggar kedaulatan Republik Indonesia merdeka dan Agama Islam. Mereka menjajah Indonesia secara beringas. Akibatnya di beberapa tempat telah terjadi konflik yang mengorbankan banyak jiwa dan harta manusia serta telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah.

- c. Bahwa perlawanan-perlawanan terhadap penjajahan oleh kapitalisme ekstraktif itu sebagian besar telah dilakukan umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia merdeka dan Agamanya.
- d. Bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu belum ada perintah dan tuntutan yang nyata dari Pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kepentingan kebanyakan rakyat atas kejadian-kejadian tersebut.
- e. Bahwa dalam sebagian besar konflik sumber daya alam Pemerintah melindungi kapitalisme ekstraktif dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat dan tidak melindungi kedaulatan Republik Indonesia sehingga telah mengkhianati Pembukaan UUD Tahun 1945 dan melanggar ajaran agama Islam.

Memutuskan:

- a. Menuntut kepada Pemerintahan Republik Indonesia untuk menghentikan usaha-usaha kapitalis ekstraktif yang membahayakan kedaulatan Republik Indonesia merdeka dan Agama.
- b. Menuntut PB Nahdlatul Ulama agar memerintahkan perjuangan “fi sabilillah” guna merebut penguasaan sumber daya alam demi tegaknya kedaulatan Republik Indonesia merdeka dan Agama Islam.
- c. Menyerukan kepada semua warga Nahdliyin dan umat Islam untuk mempertahankan tanah air dari rongrongan kapitalisme ekstraktif dengan merebut dan menasionalisasi penguasaan Sumber Daya Alam.

- d. Menuntut pemerintah Republik Indonesia untuk membatalkan, mencabut, menolak semua kontrak/ijin pengelolaan SDA yang merusak dan berpotensi merusak daya hidup masyarakat, lingkungan dan tidak sesuai kebutuhan nasional.
- e. Menuntut Pemerintahan Republik Indonesia mengembangkan dan memajukan energi terbarukan.

Sebagai organisasi yang terhitung muda, FNKSDA sudah memiliki 18 cabang di seluruh Indonesia.³⁴ Hal yang membedakan FNKSDA dengan Ormas dan LSM yang sama-sama memiliki kedekatan dengan NU adalah terletak dalam setiap bingkai yang meliputi FNKSDA. *Pertama*, nama yang diambil adalah “*Front*”, sesuai dengan AD/ART Pasal 1 menegaskan bahwa front adalah sekumpulan dari beberapa individu, Ormas dan LSM yang memiliki Visi dan Misi Organisasi, kemudian pasal tersebut dikuatkan kembali oleh pasal 3 item 2 yakni “*Perserikatan dan jaringan*”. Bukan hanya dia yang mengikuti proses kaderisasi dalam sebuah organisasi pada umumnya, tetapi lebih menekankan kepada kemiripan Visi dan Misi Organisasi. FNKSDA sendiri memiliki kaderisasi wajib yakni “*Pesantren Agraria/Sekolah Agraria*”. Terma “*Nahdliyin*” sebagai kata Front menunjukkan semangat perlawanan. Secara etimologis kata Nahdliyin memiliki makna “*Bangkit*”, tentunya tanpa dianalisis lebih jauh pasti diambil sebuah maksud yang jelas dari berdirinya organisasi. *kedua*, bukan hanya secara konsepsi gerakan tapi minim aksi. FNKSDA memberikan perhatian serius dalam AD/ART Pasal 7 dalam upaya mencapai

³⁴ Hasil wawancara dengan Roy Murtadlo pada 18 Nopember 2016

kesadaran kolektif akan kedaulatan SDA, yakni “*Tata Milik, Tata Kelola dan Tata Guna*” yang berlandaskan UUD 1945 pasal 33. Gerakan tersebut dijelaskan dalam pasal selanjutnya yang berbicara pokok-pokok perjuangan. *Ketiga*, FNKSDA adalah berdiri sebagai “*Organisasi Masyarakat*” atau *Ormas* . seperti pada umumnya Ormas pasti memiliki acuan dan landasan gerakan yakni sebuah “*ideologi*”.

FNKSDA lahir bukan semata-mata atas eksistensi sebuah kelompok tetapi mencoba meredefinisi istilah “*Resolusosi Jihad*” K.H. Hasyim Asy’ari di era saat ini. Jihad melawan kapitalisme ekstraktif yang semakin menyengsarakan. Situasi zaman menghendaki FNKSDA untuk bergerak bersama korban konflik yang *vis a vis* secara fisik dan hukum. Tidak luput dari kritikan bahwa OMEK (Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus) seperti PMII dan IPNU yang sedarah dengan FNKSDA dinilai mulai kehilangan gerakan advokasi dan meminggirkan persoalan-persoalan demikian.³⁵ Pastilah dengan kebijakan pasar bebas perlu adanya Ormas yang bergerak sebagai “*Control Social*”.

2. Ideologi Organisasi

Meskipun substansinya tidak jauh berbeda dengan term-term lain, seperti “Islam Inklusif”, “Islam Transformatif” dan “Islam Liberal”, istilah “Islam Progresif” merupakan istilah baru dalam kajian Islam kontemporer yang digunakan oleh para akademisi dan aktivis sejak beberapa tahun ini untuk memberikan label kepada pemahaman-pemahaman dan aksi-aksi umat Islam yang memperjuangkan penegakan

³⁵ Hasil wawancara dengan Roy Murtadlo tanggal 20 Mei 2017

nilai-nilai humanis, seperti pengembangan civil society, demokrasi, keadilan, kesetaraan jender, pembelaan terhadap kaum tertindas dan pluralisme. Di satu sisi pandangan dan aksi Islam Progresif, menurut Omid Safi, merupakan kelanjutan dan kepanjangan dari gerakan Islam Liberal yang muncul sejak kurang lebih seratus lima puluh tahun yang lalu. Namun, di sisi lain ia muncul sebagai bentuk ungkapan ketidakpuasan terhadap gerakan Islam Liberal yang lebih menekankan pada kritik-kritik internal terhadap pandangan dan perilaku umat Islam yang tidak atau kurang sesuai dengan nilai-nilai humanis. Sementara itu, kritik terhadap modernitas, kolonialisme dan imperialisme justru tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari gerakan Islam Liberal.

Kenyataan inilah yang memberikan inspirasi terhadap munculnya pemahaman dan aksi Islam Progresif, yang memberikan perhatian yang seimbang antara kritik internal dan kritik eksternal. Kritik internal terhadap tradisi pemikiran sebagian umat Islam yang tidak menitikberatkan pada aspek-aspek kehidupan humanis memosisikan gerakan Islam Progresif pada gerakan modernis, namun pada waktu yang bersamaan ia juga merupakan gerakan “postmodernis”, karena ia juga bersikap kritis terhadap modernitas yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan sejati dan kemanusiaan. Cara pandang, kritis dan aksi Islam Progresif semuanya hendaknya berorientasi kepada kemajuan. Atas dasar inilah ia disebut dengan istilah ‘progresif’.³⁶ Point disini membahas secara singkat model-model pemikiran dan

³⁶ Farish A Noor, *Islam Progresif: Peluang, Tantangan, dan Masa Depan di Asia Tenggara*. Terj. Moch. Nur Ichwan dan Imron Rosyadi. (Yogyakarta: SAMHA, 2006). Hal 23

gagasan progresif yang dikemukakan oleh pemikir-pemikir Muslim dari beberapa negara, sehingga kita mendapatkan gambaran umum mengenai karakteristiknya. Artikel ini juga akan mencoba mengeksplorasi bagaimana pandangan-pandangan tersebut dapat membumi di Negara Indonesia.

Pemikiran Islam progresif digagas di atas pondasi premis-premis tertentu yang dilahirkan atau disarikan dari ayat-ayat al-Qur'an. Keseluruhan pemikiran mereka dalam berbagai masalah yang terkait dengan tiga agenda besar mereka—keadilan sosial, kesetaraan gender, dan pluralisme—merupakan ramifikasi seluas-luasnya dari premis atau asumsi sebagaimana dijelaskan dalam paragraf paragraf di bawah ini.

Premis pertama, “setiap manusia, perempuan dan lelaki, muslim dan non-muslim, kaya dan miskin, Selatan dan Utara, memiliki kemuliaan intrinsik yang sama yang diberikan oleh Tuhan”. Kemuliaan intrinsik yang sama itu, menurut al-Qur'an, adalah ruh ketuhanan yang dihembuskan oleh Tuhan ke dalam diri manusia dalam proses penciptaannya. Dua ayat al-Qur'an dengan redaksi yang persis sama menyatakan itu, yaitu al-hijr: 29.

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ

Artinya : “Maka apabila telah Kusempurnakan kejadiannya dan Kutiupkan kepadanya (ciptaan)Ku, maka hendaklah kamu tersungkur bersujud kepadanya”.

Premis kedua yang selalu digandengkan dengan *premis ketiga*, karena keduanya diderivasikan dari ayat yang sama dalam al- Qur'an, masing-masing adalah “misi utama kehadiran manusia di dunia adalah untuk menjadi pejuang dan penegak

keadilan ('*adl, justice*) untuk segenap umat manusia”, dan “manusia wajib berbuat kebajikan dan berperilaku santun kepada sesama makhluk Tuhan (*insan, goodness-and-beauty*)”. Kedua premis itu disarikan dari ayat al-Qur'an yang sama, yaitu al-Nahl : 90.

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan...”

Percabangan premis di atas memiliki implikasi jauh terhadap produk pemikiran pelaku pemegang ideologi Islam progresif dan bagaimana mereka berpegang secara kritis terhadap tradisi Islam (*critical engagement*) dan juga menyikapi modernitas (*multiple critique*). Setiap produk pemikiran agama (*ijtihad*) sebagaimana halnya juga konstruk sosial dan budaya serta struktur-struktur yang berdampak kepada dehumanisasi, penodaan terhadap kemuliaan-intrinsik manusia, ketidakadilan, dan kekerasan dilawan oleh mereka.

Penulis memahami Islam Progresif sebagai negasi atas liberalisme Islam dan mencoba mendefinisikannya sebagai Islam berorientasi pembebasan yang sumbernya digali dari persilangan antara ajaran Islam, kearifan lokal, dan kritik sosial.

Islam Progresif adalah suatu gugus bagi gerakan-gerakan Islam. Suatu gugus gerakan yang berinspirasi ajaran Islam pembebasan, yang menerjemahkan ajaran tersebut ke dalam suatu praksis tertentu yang berbeda dari praktik liberalisme Islam, fundamentalisme Islam, dan moderatisme Islam. Untuk melihat praktik ini lebih jernih, lihat ke mana orientasinya. Orientasi isme-isme ini berkisar antara tiga hal: negara, pasar, masyarakat. Liberalisme Islam berorientasi pada pasar,

mensubordinasikan negara dan masyarakat di bawah pasar. Fundamentalisme Islam berorientasi pada negara (melalui doktrin *khilafah*), mensubordinasikan pasar dan masyarakat di bawah negara. Moderatisme Islam berorientasi pada keseimbangan di antara ketiganya, namun pada gilirannya terjatuh pada subordinasi masyarakat terhadap negara (melalui doktrin ketaatan umat atas pemerintah, *ulil amr*) dan pasar.

Islam Progresif harus menempuh pola yang berbeda, yaitu berorientasi pada masyarakat, mensubordinasikan negara dan pasar terhadap masyarakat, melalui kerja-kerja yang pada gilirannya membuat negara (sebagai institusi dan aparatus) tidak lagi dibutuhkan (irrelevant) dan masyarakat dapat mengelola urusannya dengan kemandirian yang berangkat dari hubungan-hubungan persaudaraan dan egaliter, dalam segala aspeknya. Termasuk di dalam kerja ini adalah penisbian prinsip pasar melalui prinsip bagi-untung dan bagi-rugi (*musyarakah*), dalam sistem koperasi umat Islam yang otonom dari ketergantungannya pada industri perbankan. Dalam pola ini, karena negara dan pasar masih eksis sebagai kekuatan yang mensubordinasi umat, maka saat ini Islam Progresif sedang berada dalam jalur perjuangan “menjinakkan” negara dan pasar dengan menentang *division of labor*³⁷, melalui kerja-kerja pengorganisasian dan edukasi politik bersama umat tentang watak Islam Indonesia dan keterjeratannya di dalam ekonomi kapitalis global dan nasional. Dalam arti itu, Islam Progresif dapat berubah-ubah bentuk: menjadi gerakan keagamaan, gerakan kultural, gerakan ekonomi, atau gerakan politik.

³⁷ *division of labour*, yaitu dimana negara miskin hanya berperan sebagai penyuplai sumber daya bagi negara kaya dan sebagai penyedia tenaga kerja yang dapat dibayar dengan upah sangat minim.

Dalam aliansinya secara luas dengan gerakan demokrasi dan aktivisme (kiri) sekular, Islam Progresif hadir secara inklusif sebagai *common platform* bagi aktivisme masa depan yang tidak memisahkan *agama dari aktivisme, akhirat dari urusan duniawi, hati nurani dari kesadaran politik*.

3. FNKSDA dan NU

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi kemasyarakatan yang memiliki tujuan di bidang ekonomi untuk “mengusahakan pemerataan kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan dengan mengutamakan berkembangnya ekonomi rakyat” sudah sepatutnya memiliki sikap terhadap persoalan ini. Terlebih-lebih, dalam banyak kasus konflik SDA di Indonesia warga NU seringkali menjadi korban langsung. Misalnya, kasus Lumpur Lapindo di Porong, penanaman dinamit untuk melakukan survei seismik oleh Exxon di Jombang, konflik warga dengan perusahaan migas di Sumenep, konflik air antara warga dengan PT Aqua Danone di Klaten dan Jombang, konflik warga dengan tentara di Pucanglaban Tulungagung dan perusahaan tambang di Kebumen, dan lain-lain.

Selain permasalahan meluasnya konflik, hal yang tak kalah penting untuk didiskusikan adalah Penguatan korporasi yang dalam beberapa kasus (misalnya: Lumpur Lapindo) sudah nyata melebihi kekuatan negara. Triad (Negara, korporasi, masyarakat) yang tadinya diimajinasikan memiliki kekuatan yang setara dengan negara sebagai regulator, pada kenyataannya tidaklah demikian. Korporasi memiliki kekuatan paling besar, diikuti oleh negara yang seringkali tunduk pada korporasi dan

masyarakat dalam posisi yang paling lemah. Hukum bukan Cuma tidak ditegakkan, tetapi sudah menjadi bagian dari bagian penyuksesan penetrasi korporasi ini.

Sejauh ini Pengurus Besar PBNU kurang memberikan perhatian terhadap permasalahan ini. Hal ini misalnya, dibuktikan dengan tidak adanya badan yang secara menerus hirau mengurus permasalahan ini di dalam struktur organisasi PBNU. Di lain sisi, konflik SDA dengan pola yang hampir sama sudah sangat banyak terjadi dan memerlukan solusi terpadu. Karena itu, Diskusi Nahdliyin tentang Konflik dan Tata Kelola SDA yang telah dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 4 Juli 2013 adalah langkah awal untuk merumuskan agenda NU di Bidang ini. Baik ia akan masuk di struktur NU ataupun sama sekali di luar.

Sebenarnya persoalan seperti ini pernah diperbincangkan di lingkungan NU. Selain kutipan orasi Gus Dur di Malang di atas, pada tahun 2012, melalui Konferensi Besar (Konbes) di Cirebon, PBNU di bidang ekonomi merekomendasikan “renegosiasi kontrak-kontrak karya pertambangan agar memberi manfaat yang lebih besar bagi pemasukan Indonesia dan kesejahteraan warga”. Elemen lain yang dekat dengan NU, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)

Malah memiliki tuntutan yang lebih tinggi. Pada tahun 2012 PMII menuntut dilakukannya nasionalisasi terhadap aset pertambangan dan energi.³⁸ Sementara,

³⁸ Pernyataan PB PMII menyangkut nasionalisasi ada di banyak laman di internet, antara lain: 1]Anam, A.K. (redaktur), 23/05/2013. PMII Desak Menteri BUMN Nasionalisasi Tambang. Berita ini dapat dibaca di: <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,38069-lang,id-c,nasional-t,PMII+Desak+Menteri+BUMN+Nasionalisasi+Tambang-.php>, diakses pada tanggal 24/05/2017; dan 2]Rasyid, Y., 31/03/2013. Mahasiswa Yogya Tuntut Nasionalisasi Migas. Berita ini dapat dibaca di: <http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy-nasional/12/03/31/m1qn2r-mahasiswa-yogya-tuntut-nasionalisasi-perusahaan-migas>, diakses pada tanggal 24/05/2017.

Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU), menyatakan bahwa tujuan akhir dari tata kelola energy adalah kedaulatan dan ketahanan energy nasional.³⁹ Akan tetapi secara organisatoris, hampir tidak ada gelombang advokasi yang massif dari kelompok NU terhadap warga yang mengalami persoalan konflik SDA. PBNU sendiri lebih banyak bermain di level regulasi seperti judicial review UU Migas, tetapi tidak banyak mendorong pengurus untuk turun ke bawah. Diskusi Nahdliyin tentang Konflik dan Tata Kelola Sumber Daya Alam SDA yang sudah diselenggarakan pada tanggal 4 Juli 2013 bertempat di Pendopo LkiS, Yogyakarta, pada dasarnya diinisiasi oleh kelompok organik NU yang memiliki kepedulian mengenai permasalahan ini Lihat Lampiran Pengundang Pertemuan Yogyakarta. Kelompok ini terdiri dari personal yang bekerja sebagai akademisi, aktivis sosial atau pengurus NU sendiri. Dalam diskusi ini telah hadir utusan dari berbagai daerah di Indonesia yang memiliki permasalahan dengan konflik SDA. Utusan-utusan tersebut meliputi Jombang, Pati, Porong, Cirebon, Batang, Kebumen, Kulon Progo, Mandailing Natal, Tenggara, dan Mojokerto. Para Utusan yang hadir ada yang merupakan kelompok langsung yang terkena imbas dari adanya konflik SDA di daerah daerah di atas dan aktivis yang tergabung dalam berbagai lembaga/instansi yang berhubungan dengan NU.

Hal konflik SDA seperti Banyuwangi (tambang emas), Sumenep (eksplorasi minyak dan gas/migas) Lampung konflik petani tambak, dan Kudus (konflik hutan dan tanah) namun belum bisa hadir dalam kesempatan ini, walaupun pada awalnya

³⁹ ISNU, *Tambang untuk Rakyat*, dalam Syeirazi, M.K. (editor), 2013. *Kebangkitan Bangsa Indonesia 1945-2045: Pokok-pokok pikiran sarjana Nahdlatul Ulama*. LP3ES, Jakarta, 51F79. Lebih jauh, dalam buku ini ISNU mendukung dilaksanakannya reforma agraria

menunjukkan antusiasme yang tinggi untuk mengikuti pertemuan. Dari diskusi tersebut, selain pembahasan mengenai permasalahan dimasing-masing simpul, Telah diperoleh kondisi obyektif keindonesiaan, bahwa penetrasi actor (nasional dan global) Ke pedalaman melalui sector industry ekstraktif—galian C, pembangkit listrik, minerba, migas, Dan air—sudah sangat intens. Dalam beberapa kasus, kaum tani berada dalam posisi yang *vis a vis* dengan korporasi karena perebutan akses terhadap dan kontrol atas sumberdaya. Sikap elit NU terbelah. Dalam kasus di Kebumen ada bagian NU yang berpihak

kepada tuntutan warga, sementara di kasus Pati elit NU berpihak kepada kepentingan korporasi dapat dilihat di: Lampiran Kasus Pegunungan Kendeng Utara)⁴⁰ dan di beberapa kasus yang lain seperti di Tenggarong elit NU tidak belum memiliki sikap yang jelas. Para peserta pertemuan sepakat bahwa para utusan yang hadir membutuhkan sebuah wadah untuk terus menerus menghiraukan permasalahan konflik SDA. Dari berbagai diskusi yang berkembang, maka wadah termaksud diberi nama Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam, disingkat FNKSDA.

Sebagai sebuah wadah, FNKSDA memiliki sikap berikut.

a. Ke luar NU

⁴⁰Suara arus bawah NU muncul dari pengurus NU Kecamatan Gabus yang menolak pendirian Pabrik Semen Gresik di Pati. Lebih jauh tentang ini dapat disimak di: Kodi, M. 2009. Cara NU Gabus Tolak Pendirian Pabrik Semen Gresik. Ada di <http://www.desantara.or.id/01-2009/139/cara-nu-gabus-tolak-pendirian-pabrik-semen-gresik/>, diakses pada tanggal 25 Mei 2017. Contoh keberpihakan kiyai-kiyai NU terhadap korporasi dapat dilihat misalnya dari munculnya fenomena kiyai migas di Madura, yaitu kiyai-kiyai yang memuluskan jalan perusahaan minyak dan gas (migas) di Madura untuk membebaskan lahan

FNKSDA tidak dalam posisi berebut pengaruh dengan lembaga-lembaga yang sudah ada sebelumnya seperti Walhi, JATAM, KPA, SPI, FKMA, UPC, Desantara, dan lain-lain, tetapi akan menjadi partner produktif dalam upaya menegakkan tata kelola SDA yang berdaulat dan adil. Jadi, bagi kelompok-kelompok yang sudah berafiliasi dengan (misalnya) salah satu lembaga di atas atau pun yang belum disebutkan, maka teruskan afiliasinya sambil secara pelan-pelan mulai melakukan pendidikan untuk internal NU.

b. Ke dalam NU

FNKSDA tidak akan mengambil langkah frontal. FNKSDA akan menjadi elemen organik di dalam NU dalam rangka pengarusutamaan tata kelola SDA.

4. Strategi Gerakan FNKSDA Didalam Upaya Mencapai Agenda-agenda Organisasi

Dalam menjalankan aktivitasnya ada beberapa panduan pokok yang akan dipakai oleh FNKSDA. Panduan pokok itu meliputi isu yang akan direproduksi, kerangka analisis, dan metode gerak. Isu yang akan direproduksi terdiri adalah keselamatan warga dan kedaulatan pangan sementara ekologi dan bencana industry akan dipakai sebagai kerangka analisis pada setiap kasusnya dan silaturrahi akan menjadi metode dalam membangun gerakan dan merebut simpati khalayak yang lebih luas. Penjelasan masing-masing seperti pada bagian berikut.

Membangun pengetahuan baru pada dasarnya adalah salah satu proyek yang sangat penting dalam FNKSDA. Salah dua isu yang sangat mungkin direproduksi

adalah isu “*keselamatan warga*” dan “*kedaulatan pangan*”. Keselamatan warga menjadi sangat masuk akal dijadikan sebagai salah satu materi kampanye apabila berkaca dari kasus bencana industri Lumpur Lapindo. Hal inilah yang sudah dilakukan di Jombang dalam kasus Exxon.

Kedaulatan pangan pada intinya adalah jaminan terhadap kebutuhan pangan dengan kepedulian terhadap asal-usul bahan pangan tersebut. Kondisi faktual bahwa warga Nahdliyyi sebagian besar adalah kaum tani. Kaum tani pada dasarnya menyuplai beras untuk masyarakat di Indonesia, khususnya mereka yang tinggal di kota. Apabila penyuplai bahan pangan berada dalam kondisi kritis, maka otomatis kalangan yang disuplai pun akan berada dalam kondisi kritis.

Lebih jauh, isu keselamatan warga dan ketahanan pangan ini dapat dibingkai dengan kerangka analisis ekologi dan bencana. Cara pandang ekologi akan membantu untuk melihat persoalan secara runtut dan saling terkoneksi (ekosistemik). Sementara, kerangka bencana akan meningkatkan kewaspadaan, terutama dalam hal ini yang bersifat industrial.

Perspektif-perspektif di atas pada akhirnya harus diturunkan ke dalam metode gerak yang dinilai paling memungkinkan dilakukan di kalangan NU: silaturahmi. Dalam melakukan silaturahmi awal, harus terlebih dahulu dipastikan bahwa pengurus NU (PC, PW, atau PB) yang akan ditemui belum bersikap dalam sebuah kasus konflik SDA, atau kalau sudah bersikap pengurus NU terkait berada dalam barisan kepentingan warga. Daerah-daerah yang sudah panas seperti Pati dan Banyuwangi, dimana ada elit NU local yang berpihak kepada korporasi sebaiknya

ditunggu dulu sampai FNKSDA mengalami kematangan. Apabila secara politik dirasa sudah matang, maka FNKSDA akan mengambil langkah progresif yang dibutuhkan dalam menyadarkan kelompok NU yang sudah bersikap kontra jamaah. Setiap simpul daerah yang tergabung dalam FNKSDA bisa mengadakan halaqoh SDA dan memobilisasi jaringan FNKSD untuk berpartisipasi. Kegiatan ini sekaligus untuk mempersempit ruang gerak elit NU yang sudah mengambil langkah kontra jamaah dengan cara misalnya, mengajak anak-anak muda NU untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan halaqoh SDA.

Tujuan FNKSDA adalah: mewujudkan tata kelola SDA yang berkedaulatan dan sebesar-besarnya bermanfaat bagi rakyat Indonesia.⁴¹

Dampak-dampak yang diharapkan dari adanya gerakan sosial FNKSDA adalah:

- 1.Lahirnya FNKSDA sebagai organisasi yang fokus dalam hal tata kelola SDA dan dapat mendorong terbentuknya kelompok kerja pokja terkait SDA di tubuh NU dan banom-banomnya FNKSDA sendiri ke depan bisa menjadi bagian internal PBNU atau tetap di luar PBNU.
- 2.Adanya proses penyusunan tata Kelola SDA yang berkedaulatan dan mengakomodasi kepentingan jamaah NU secara khusus, dan rakyat yang lebih luas pada umumnya.
- 3.Menjadikan isu manajemen SDA sebagai peluang untuk melahirkan gelombang kepemimpinan di NU pasca isu pluralisme. Isu pluralisme yang didorong oleh Gus Dur sudah melahirkan banyak pemimpin muda di

⁴¹ Dapat dilihat dalam laman resmi FNKSDA www.daulathijau.org

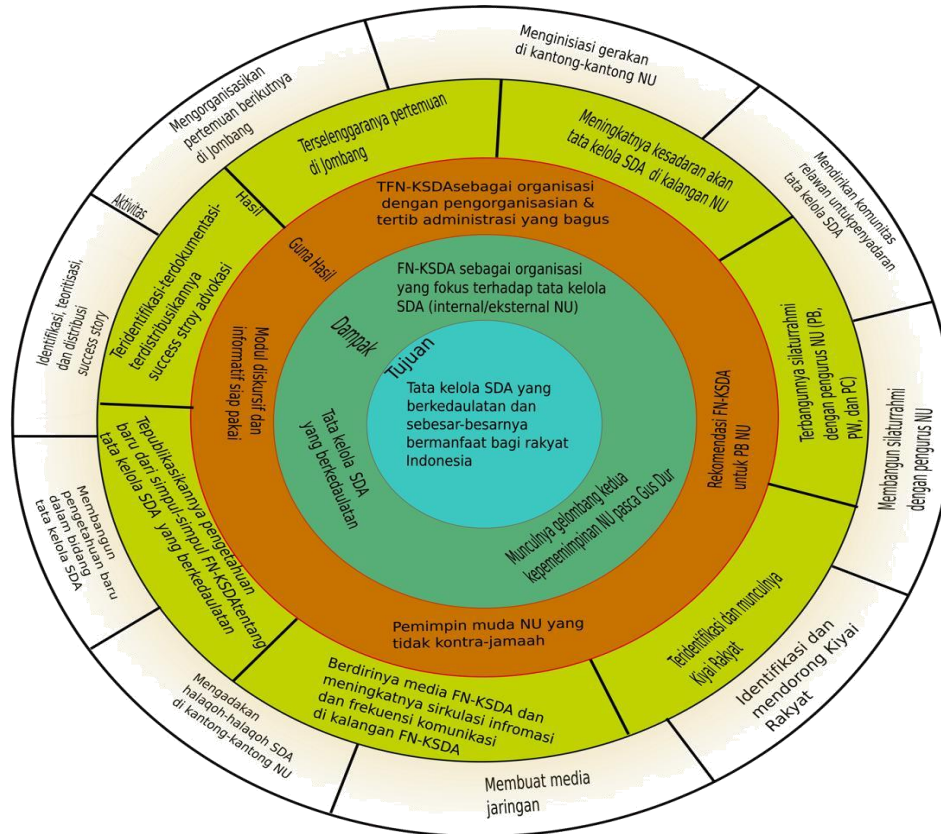
komunitas NU di tingkat lokal dan nasional, meskipun sangat sedikit yang mengerucut sampai ke pemimpin politik seperti kepala daerah. Isu plularisme dalam hal ini, dianggap sebagai gelombang pertama kepemimpinan di tubuh NU pasca Gus Dur. Tata kelola SDA menjadi gelombang berikutnya yang harus disiapkan. Model pelahiran kepemimpinan baru ini sudah terlihat dalam gerakan Petani Urutsewu Kabupaten Kebumen. Lihat Lampiran Kasus Kasus.

Aktivitas gerakan untuk mewujudkan tujuan dan dampak di atas maka FNKSDA akan melakukan aktivitas-aktivitas berikut:

1. Pertemuan di Jombang dengan target jamaah yang lebih luas.
2. Mengidentifikasi meneorikan dan mendistribusikan successstory di berbagai daerah advokasi misalnya Jombang, Kebumen, dan Pati agar daerah-daerah yang memiliki permasalahan yang mirip kelakakan lebih siap.
3. Mengidentifikasi dan mendorong kiyai rakyat, yaitu kyai yang memiliki keberpihakan kepada kepentingan rakyat dalam permasalahan konflik SDA.
4. Membangun pengetahuan baru di NU tentang tata kelola SDA yang dapat meliputi pembuatan modul-modul diskursif sekaligus informatif dengan sasaran pembaca para penggerak NU untuk memberikan gambaran yang lebih konkrit bagi para pegiat NU dalam merancang strategi gerakan dan memetakan posisinya terkait permasalahan manajemen SDA,
5. Halaqoh halaqoh SDA di kantong Kantong NU dengan tujuan pengarusutamaan isu manajemen SDA.

6. Membentuk media jaringan website untuk melancarkan sirkulasi informasi dan konsolidasi gerakan.
7. Silaturahmi dengan para pengurus NU yang dirasakan terbuka dengan isu ini untuk membangun aliansi dan pengaruh yang lebih luas bagi FNKSDA.
8. Mendirikan komunitas relawan yang akan bertugas memberikan informasi kepada pengurus NU daerah dalam hal bahaya industri ekstraktif.
9. Menginisiasi gerakan di daerah yang belum memiliki keterwakilan simpul dengan cara sebisa mungkin melibatkan elemen NU.

Bagan berikut mengilustrasikan kerangka kerja di atas dalam bentuk tingkatan perubahan dengan menambahkan dua tahap lain, hasil dan penggunaan hasil.



5. Diseminasi Wacana dan Gerakan Melalui Media

Media sebagai ruang dimana berbagai Ideologi direpresentasikan. Ini berarti, di satu sisi media bisa menjadi sarana penyebaran ideologi penguasa, alat legitimasi dan kontrol atas wacana publik. Namun di sisi lain, media juga bisa menjadi alat resistensi terhadap kekuasaan. media bisa menjadi alat untuk membangun kultur dan ideologi dominan bagi kepentingan kelas dominan, sekaligus juga bisa menjadi instrumen perjuangan bagi kaum tertindas untuk membangun kultur dan ideologi tandingan. (*Antonio Gramsci*)

Media tidak netral, sehingga perkembangan media yang ada memang revolusioner, namun tidak utopian. Artinya, sejauh mana media dapat bermanfaat sangat bergantung dari siapa dan bagaimana seseorang menggunakan teknologi tersebut. Selanjutnya, media dimasukkan dalam kategori ruang siber karena merupakan hasil dari perkembangan teknologi Internet. Dalam aktivitas politik, ruang siber dan ruang fisik memiliki hubungan yang saling bergantung (interdependent) antara satu dengan yang lain. Maksudnya, satu dimensi dapat membangkitkan, memperkuat, melemahkan, atau bahkan membunuh dimensi yang lain. Poin pentingnya adalah manfaat media sosial dalam aktivitas politik sangat bergantung pada siapa dan bagaimana masyarakat Internet (netizen) menggunakan media.

Sebagai bagian dari ruang siber, media sosial ikut memiliki enam karakteristik kunci sebagaimana disebutkan oleh Mitra dan Cohen⁴². Keenam karakter media sosial antara lain: 1) *intertextuality*, artinya setiap teks memiliki tautan pada teks yang lainnya. Dengan demikian, makna teks tidak bisa berdiri sendiri. Teks harus dimaknai bersama-sama dengan teks lain yang masih berkaitan, baik teks pada masa lampau maupun teks masa kini. Hal ini berkaitan dengan makna pesan dalam media sosial. Suatu kiriman (posting), komentar (comment) baru memiliki makna ketika dikaitkan dengan kiriman, komentar, atau 2) *Nonlinearity*, artinya setiap halaman situs, atau komentar tidak dapat diketahui mana awal dan akhirnya. Bisa saja kicauan terakhir menjadi topik obrolan yang baru. Selanjutnya, 3) Terdapat distingsi yang kabur antara pembaca dan penulis (*blurring the reader/writer distinction*). Pengguna media mengkonstruksi teks melalui akses pada setiap tautan yang berkaitan. Adapun akses terhadap konten tidak bisa dikontrol oleh penulisnya. Hal ini berkaitan dengan karakter netizen sebagai *user-content-generated*, artinya pengakses memproduksi konten, mendistribusikannya, sekaligus menjadi konsumen dari konten itu. Karakter 4) *multimediansess* yaitu adanya konvergensi antara media, gambar, suara, dan teks di media sosial. Misalnya, teks yang ada di *website* juga bisa disertakan dengan gambar atau tautan (link) sehingga konten mengandung lebih banyak karakter. 5) Sifat internet global membuat konten dapat disebar dan diakses secara luas tanpa ada batasan ruang dan waktu secara cepat. Pesan tidak hanya disebar

⁴² Nasrullah. *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 177.

ke satu orang, tetapi langsung ke banyak orang tanpa melalui gatekeeper layaknya media arus utama. Terakhir, 6) *ephemerality* bahwa teks di media tidak stabil karena bisa saja dihilangkan oleh penggunanya.

Jika ditilik dengan lebih seksama, karakter media dapat dikelompokkan menjadi dua dimensi, yakni dimensi konten serta dimensi khalayak. Dimensi konten berkaitan dengan *intertextuality*, *nonlinearity*, *multimediality*, dan *ephemerality*. Sedangkan dimensi khalayak berkaitan dengan *user-generated-content*, dan *global*. Dua dimensi ini akan menjadi fokus peneliti saat melihat bagaimana aktivitas media sosial dalam gerakan. Aktivitas media dimaknai sebagai strategi gerakan. Strategi adalah penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang, dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan itu.⁴³ Sehingga, penggunaan media memang sengaja ditetapkan sebagai salah satu bentuk alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan gerakan.

Setelah melihat berbagai gerakan yang berhasil disebarkan melalui media, terlihat pola yang sama bahwa transformasi strategi dari aktivitas media ke gerakan nyata terjadi akibat peluang dalam struktur politik negara. Misalnya saja keterbukaan sistem politik yang berimbas pada kemudahan akses terhadap teknologi Internet. Media sosial tentu tidak dapat berperan dalam gerakan jika berhadapan dengan rezim otoriter. Rezim otoriter dapat dengan mudah memutus arus teknologi informasi sehingga akses tidak tersedia bagi masyarakat kelas

⁴³ Chandler dalam Singh, Rajendra. 2002. "Teori Gerakan Sosial Baru". Dalam Wacana Jurnal Ilmu Sosial Transformatif No. XI.

menengah. Dengan demikian, peluang politik menjadi salah satu aspek penting dalam pemanfaatan media sebagai strategi gerakan.

Sehingga, semakin jelas bahwa strategi gerakan sosial tidak hanya berfokus pada akto gerakan tetapi juga struktur. Rasionalitas aktor gerakan mampu menangkap realitas, menghasilkan keluhan baru, serta menyebarkannya melalui konten media untuk mobilisasi kesadaran kolektif dan dukungan. Di saat yang sama, sistem politik menyediakan peluang maupun hambatan dalam perkembangan gerakan itu sendiri.

Alasan penggunaan media sebagai strategi gerakan semestinya tidak bisa dilihat hanya sebagai hasil dari pilihan rasional para aktor gerakan. Hal ini karena seseorang bertindak atas dasar keyakinan dan preferensi mereka. Adapun keyakinan dan preferensi tersebut tidak dapat lepas dari fakta objektif tentang mereka seperti kelas sosial, ras, atau posisi institusionalnya.⁴⁴ Berlawanan dengan kaum rasionalis dan positivis, aktivitas politik harus dijelaskan oleh kebijaksanaan dan klaim moral dalam tradisi perilaku yang relevan. Dengan demikian, setiap tindakan dapat dijelaskan melalui pandangan awam atas kehidupan sehari-hari, atau yang disebut sebagai *life world of everyday common sense*. Di sisi lain, sejumlah aktivitas media sosial terbukti mampu membangkitkan aksi di dunia nyata. Keberhasilan ini bukan semata-mata pengaruh dari media secara mandiri (*independent*), melainkan dipengaruhi pula oleh konteks sejarah politik suatu

⁴⁴ Marsh, David & Gerry Stoker. 2002. *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*. Helmi Mahadi dan Shohifullah (Terj.). Bandung: Nusa Media, hal. 161.

masyarakat dalam upaya perebutan kekuasaan. Asumsi peneliti, aktivitas media dapat dijelaskan melalui pandangan awam para aktor gerakan terhadap media dalam konteks kehidupan mereka sehari-hari.

Sebagai salah satu agenda gerakan, media mendapat perhatian serius untuk menjalankan gerakan. problem diseminasi wacana gerakan yang sering dialami organisasi masyarakat pada umumnya sudah diantisipasi terlebih dahulu oleh FNKSDA. Pembangunan basis media utamanya didudukan sejajar dengan aksi lapangan dalam advokasi. Dalam sukseksi gerakan FNKSDA memiliki *website* resmi yakni www.daulathijau.org, namun istilah “*Front*” juga dipakai dalam membangun diseminasi wacana dan gerakan yang baik. Jejaring yang dibangun FNKSDA memiliki beberapa sahabat dalam suskseski melancarkan diseminasi wacana atas sebuah isu, misalkan www.islambergerak.com, www.indoprogress.com, www.literasi.co.⁴⁵

6 Profil Jaringan FNKSDA

a. Yayasan LKiS

Yayasan LKiS berdiri sejak 1992. Pembentukannya dirintis oleh sekelompok aktivis muda dari kultur Islam tradisional yang intens berdiskusi dan mengembangkan pemikiran ke arah yang lebih transformatif dan toleran. Saat itu, orde baru berkuasa. Gagasan kritis begitu dibatasi dan ditekan. Namun, kelompok ini

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Roy Murtadlo pada 19 Nopember 2016

terus memperdalam kajian mengenai wacana Islam dan juga mengaplikasikannya dengan mengadvokasi pihak-pihak yang didiskriminasi dan dimarginalkan.

Dengan pembentukan yayasan, pemikiran para aktivis ini disebarluaskan secara lebih strategis melalui media dan jaringan. Media yang dipilih antara lain; buku, buletin, dan kampanye melalui media cetak maupun elektronik. Sedangkan jaringan yang dikembangkan ialah; komunitas anak muda dari berbagai macam latar belakang, pesantren dan majlis taklim. Diharapkan dari kegiatan ini lahir jiwa-jiwa kritis, transformatif dan toleran. Selain itu, kami juga aktif melakukan advokasi bersama masyarakat dan lembaga-lembaga yang memiliki perhatian isu yang sama demi mewujudkan visi dan misi.

Memasuki era reformasi, gerakan ini terus dilakukan. Sebab pada kenyataannya, pemerintah memerlukan dukungan dan pengawalan kritis di segala bidang. Baik itu pendidikan, sosial, budaya, politik, ekonomi, maupun hukum, pertahanan dan keamanan. Yayasan LKiS mendukung upaya mempertahankan Bhineka Tunggal Ika. Sehingga, perbedaan yang ada bukan untuk melahirkan perpecahan, melainkan modal penting bagi terciptanya karya bersama untuk kemajuan bangsa dan tanah air.

Yayasan LKiS senantiasa berpijak dalam kerangka Islam sebagai agama 'rahmatan lil alamin', anugerah bagi sekalian alam. Oleh karenanya, semua aktivitas yang dijalankan bertujuan untuk mendorong terwujudnya perdamaian dalam keberagaman, kesetaraan gender dan pemenuhan hak-hak dasar setiap insan. Gerakan ini diharapkan bisa semakin luas dirasakan dan dilakukan oleh individu, kelompok

maupun jaringan. Sehingga, semakin banyak tangan kreatif yang bahu-membahu dalam upaya mencapai tujuan itu.

Sebagai salah satu jaringan gerakan yayasan LKiS memberikan banyak pengaruh kepada FNKSDA dalam banyak hal. Selain sebagai yayasan yang memproduksi dan mereproduksi wacana gerakan, LKiS juga memberikan banyak kontribusinya kepada FNKSDA, banyak relawan LKiS memiliki keanggotaan FNKSDA turut aktif bergerak menyuarakan hajat hidup umat dan bisa kita ketahui bahwa FNKSDA dirintis melalui diskusi di pendopo LKiS pada bulan juli 2013 dan kemudian deklarasi di Tebuireng Jombang 08-09 Desember 2013

b. Gusdurian

Gusdurian adalah sebutan untuk para murid, pengagum dan penerus pemikiran dan perjuangan Gus Dur. Para GUSDURian mendalami pemikiran Gus Dur, meneladani karakter dan prinsip nilainya, dan berupaya untuk meneruskan perjuangan yang telah dirintis dan dikembangkan oleh Gus Dur sesuai dengan konteks tantangan zaman.

Jaringan gusdurian adalah arena sinergi bagi para gusdurian di ruang kultural dan non politik praktis. Di dalam jaringan gusdurian tergabung individu, komunitas/forum lokal, dan organisasi yang merasa terinspirasi oleh teladan nilai, pemikiran, dan perjuangan Gus Dur. Karena bersifat jejaring kerja, tidak diperlukan keanggotaan formal.

Jaringan gusdurian memfokuskan sinergi kerja non politik praktis pada dimensi-dimensi yang telah ditekuni Gus Dur, meliputi 4 dimensi besar: Islam dan Keimanan, Kultural, Negara, dan Kemanusiaan. Nilai, pemikiran, perjuangan GusDur tetap hidup dan mengawal pergerakan kebangsaan Indonesia; melalui sinergi karya para pengikutnya, dilandasi 9 Nilai Gus Dur: **Ketauhidan, Kemanusiaan, Keadilan, Kesetaraan, Pembebasan, Persaudaraan, Kesederhanaan, Sikap Ksatria, dan Kearifan Tradisi.**

Dalam menjalankan amanah jaringan, SekNas JGD memfokuskan diri pada program-program penyebaran gagasan, memfasilitasi konsolidasi jaringan, memberikan dukungan pada upaya (program) lokal, program kaderisasi, dan peningkatan kapasitas jaringan.

Selain itu, SekNas juga menjadi koordinator untuk program-program bersama lintas komunitas gusdurian, serta menginisiasi kelas-kelas khusus terkait jaringan. Beberapa di antaranya:

1. Kelas Pemikiran Gus Dur
2. Forum kajian dan diskusi
3. Kampanye Anti Korupsi
4. Pelatihan entrepreneurship
5. Forum budaya
6. Workshop Social Media
7. Dalam rintisan: Koperasi gusdurian

Sedangkan kegiatan-kegiatan advokasi dilakukan melalui organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan **jaringan gusdurian** dalam bentuk dukungan kerja yang bersifat khas. Misalnya kasus kendeng, urut sewu, tumpang pitu (banyuwangi) afiliasi gerakan advokasi Gusdurian dengan FNKSDA, GLI, JATAM, dan lain-lain.

c. Fahmina Institute

FAHMINA adalah lembaga nirlaba dan non-pemerintah yang bergerak pada wilayah kajian agama dan sosial, serta penguatan masyarakat. Sebagai organisasi *civil society*, Fahmina terbuka dengan keanggotaan lintas etnis, ideologis, agama, dan gender. Kehadirannya berawal dari pergumulan kaum muda Pesantren Cirebon, yang memunculkan kesadaran berbagai pihak untuk mengembangkan tradisi intelektual dan etos sosial pesantren dalam merespon perkembangan kontemporer, terutama isu ketidakadilan sosial, hegemoni budaya, represi politik, dan eksploitasi ekonomi yang menimpa mayoritas masyarakat tak berdaya. Berangkat dari pergumulan itulah, pada bulan November 2000, Fahmina didirikan oleh Husein Muhammad, Affandi Mochtar, Marzuki Wahid, dan Faqihuddin Abdul Kodir, dan pada bulan Februari 2001 lembaga ini diluncurkan ke publik.

Sejak tahun 2007, status hukum lembaga Fahmina berubah menjadi Yayasan Fahmina. Yayasan Fahmina menaungi Lembaga Fahmina Cirebon, Lembaga Fahmina Jakarta, Institut Studi Islam Fahmina (ISIF), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran 'Buana Bahari Cirebon', Penerbit *Noktah Tsaqafah*, Perpustakaan *Bayt al-Hikmah*, dan Pondok Pesantren Majasem.

Dengan empat misi dari Fahmina Institute yang tegas membicarakan persoalan umat, Fahmina menjalin afiliasi dengan FNKSDA untuk menjalankan gerakannya.

d. Yayasan Desantara

Desantara Foundation adalah lembaga sosial yang memiliki minat terhadap isu penguatan komunitas (khususnya dari kelompok minoritas), yang terkait isu multikultural dan lingkungan

Desantara Foundation adalah salah satu lembaga sosial berbadan hukum yayasan yang memiliki minat terhadap isu penguatan komunitas (khususnya dari kelompok minoritas), yang terkait isu multikultural dan lingkungan.

Desantara Foundation membangun jaringan di kalangan anak muda, kelompok Islam (khususnya di kalangan pesantren), kelompok minoritas, komunitas-komunitas berlandaskan kesamaan adat/budaya/agama, dan stakeholders lain untuk dipertemukan dan di dorong menjadi masyarakat sipil yang partisipatif.

Salah satu kekuatan Islam di Indonesia yang patut diperhitungkan sampai saat ini adalah lembaga pesantren. Di kalangan masyarakat arus bawah pesantren menjadi bagian penting yang tidak dapat dikesampingkan. Pesantren hingga saat ini telah sukses menjadi lembaga pendidikan paling populis yang memiliki jaringan lintas kelas dan etnis selama puluhan tahun. Bersamaan dengan lapisan kelas menengah dari kalangan pesantren yang mengenyam pendidikan tinggi kelompok pesantren yang berserak di berbagai tempat di pedesaan ini turut meramaikan aksi

gerakan masyarakat sipil. Paling tidak kenyataan ini dapat dilihat dari semakin tuumbuhnya forum diskusi, kajian sosio-keagamaan, jaringan advokasi akar rumput, gerakan perempuan dari kalangan muda pesantren yang juga memiliki basis pendidikan di universitas dan perguruan tinggi Islam.

Desantara lahir di tengah komunitas seperti ini. Bersamaan dengan terus menguatnya krisis dan delegitimasi Orde Baru, Desantara terus tumbuh sebagai jaringan pemikiran dan gerakan *civil society* dari kalangan muda yang menginginkan terjadinya perubahan di Indonesia yang lebih demokratis. Latar belakang pesantren tradisional dan minat studi di perguruan tinggi yang berbeda-beda merupakan simpul yang mempertemukan mereka. Salah satu isu menarik yang terus diminati di forum ini adalah keinginan untuk mengembangkan wacana kebudayaan sebagai modal kultural yang lebih transformatif. Pesantren bersama dengan kekuatan-kekuatan arus bawah lainnya dibidik sebagai target yang diharapkan menjadi salah satu agen transformatif tersebut.

Sebagaimana kita ketahui sebelumnya, kebijakan kebudayaan di masa Orde Baru menghasilkan sejumlah implikasi sosio kultural yang begitu besar di kalangan masyarakat akar rumput. Peristiwa 1965 dianggap sebagai titik balik orientasi kebudayaan yang menceraiberaikan berbagai kekuatan-kekuatan politik di masyarakat untuk kemudian di bawah ke dalam sistem Orde Baru yang mengakibatkan terjadinya *floating mass*.

Desantara berminat ingin menyegarkan kembali pergulatan, kontestasi dan dialog yang tumbuh subur sebagaimana pernah terjadi di masa sebelumnya. Bagi

Desantara sejarah yang terputus harus dirememorisasi, direinvensi dengan semangat yang lebih aktual dengan cara mengangkat dan memberi ruang kembali kekuatan-kekuatan kebudayaan di masyarakat yang lebih otonom, inklusif dan demokratis.

Bidang pertama yang digeluti menjadi program berkelanjutan adalah pembentukan komunitas-komunitas epistemik di kalangan pesantren dan komunitas lokal (masyarakat adat) untuk menjembatani kesenjangan dan ketegangan pemikiran diantara mereka. Terbentuknya komunitas ini seterusnya menjadi modal sosial bagi terus tumbuhnya pemikiran dan praktik kebudayaan yang lebih inklusif dan liberatif di massa rakyat. Pesantren dan komunitas-komunitas lain di tingkat lokal perlu didorong agar memiliki kapasitas untuk berkiprah di ruang publik. Dalam konteks ini Desantara memfasilitasi terbentuknya ruang komunikasi yang partisipatoris sekaligus mendorong repositioning subyek yang transformatif di tengah himpitan struktur dan praktik budaya yang melingkupinya.

Maka dalam perkembangannya, jaringan dan komunitas Desantara di tingkat akar rumput menuntut tersedianya proses pendampingan yang lebih luas. Bagi Desantara penyemaian gagasan keagamaan yang lebih inklusif dan transformatif berdampak pula kepada keharusan membangkitkan politik kewargaan yang lebih kritis di berbagai bidang. Problem massa rakyat tidak dapat disempitkan semata kepada satu isu tunggal.

Karena, dalam pengalaman Desantara, kebudayaan ternyata tidak sebatas representasi simbolik sebagaimana dalam kesenian dan ritual. Bagi Desantara Kebudayaan meliputi berbagai proses interaksi antar manusia yang menghasilkan

berbagai makna simbolik sebagai representasi dari beragam kepentingan untuk mendominasi, menghegemoni, mengintimidasi, mengeksklusi, dan juga kepentingan untuk membebaskan dan mencairkan beragam bentuk dominasi dan represi tersebut. Di tengah situasi seperti ini maka bagi Desantara kerja atau praktik kebudayaan itu setidaknya memiliki tiga hal:

1. Representasi proses emansipasi manusia untuk memperjuangkan serta menegakkan hak-hak dan martabatnya
2. Representasi pluralitas dan kemajemukan suatu komunitas atau masyarakat; dan
3. Konsep holistik yang mencakup dimensi etik, estetik dan progresif-evaluatif; terbentuk oleh dan melalui interaksi antar sesama manusia dan antar berbagai aspek kehidupan.

Pandangan seperti ini mengimplikasikan suatu kebutuhan membangun gerakan sosial yang mampu menembus aspek-aspek ketimpangan sosial, politik dan kebudayaan di massa populer.

a. Omah Kendeng

Omah Kendeng. Sebuah rumah di lereng Pegunungan Kendeng yang dibangun bersama oleh warga Pegunungan Kendeng Utara dan berbagai elemen yang sepeham untuk belajar tentang arti perdamaian dan kemandirian demi menjaga kelestarian alam dan nilai-nilai kemanusiaan.

Omah Kendeng adalah salah satu yang bersuara dan menentang isu pembangunan pabrik semen di kendeng dan urut sewu, karena posisi *vis a vis* langsung secara fisik dan hukum dengan aparaturnya Negara dan antek-antek pabrik semen dalam menjaga kedaulatan SDA. Dalam gerakannya Omah kendeng banyak menjalin afiliasi dengan banyak ormas dan LBH, salah satunya adalah FNKSDA. Omah kendeng juga merupakan kaki dari yayasan Desantara Foundation.

b. Sofi Institute

SOFI Institute (*Social Movement for Indonesia*) adalah lembaga yang konsen pada riset dan aksi (akar rumput dan konstitusi) sebagai ikhtiar untuk mewujudkan tatanan masyarakat secara partisipatif, pun sekaligus sebagai simpul dari jejaring gerakan sosial yang berlandaskan pada nilai-nilai Hak Asasi Manusia, Demokrasi, Keberagaman dan Kebudayaan, dan Kebebasan.

Berangkat dari kegelisahan kedaerahan, SOFI Institute kemudian berkomitmen menjadikan dirinya tidak hanya sebagai laboratorium sosial–berkutat pada riset semata namun melakukan aksi sebagai implementasi dari semangat untuk melakukan gerakan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Lembaga ini bersifat independen, dalam artian tidak terkait kepada organisasi politik apapun atau organisasi manapun. Berdiri pada tanggal 10 Desember 2013, lembaga ini akan terus mengawal dan mengelola isu-isu kedaerahan sehingga akan mampu menjadi daya tawar terhadap kekuatan dominatif (segelintir elit) yang biasa terjadi di lingkup daerah. Kami yakin hal tersebut merupakan satu cara kecil untuk mejadi Indonesia yang lebih baik karena kami tahu, membangun Indonesia

berarti usaha menggali potensi dan kelemahan daerah sebagai tantangan yang menunggu untuk ditaklukan.

VISI

Terwujudnya tatanan sosial secara partisipatif berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang berlandaskan Hak Asasi Manusia, Demokrasi, Keberagaman, Kebudayaan, dan Kebebasan melalui riset serta pengabdian kepada masyarakat.

MISI

Melakukan gerakan sosial yang berdasarkan hasil riset secara partisipatoris untuk menciptakan perubahan sosial.

Misi Penelitian

- Memotret dinamika sosial masyarakat melalui riset secara objektif.
- Menyediakan keterbukaan informasi untuk kepentingan publik.
- Menjadikan hasil riset sebagai pertimbangan kebijakan publik.

Misi pengabdian masyarakat

- Meningkatkan kesadaran kritis masyarakat tentang pentingnya hak asasi manusia, demokrasi, keberagaman, kebudayaan, dan kebebasan.
- Mengajak masyarakat untuk berperan aktif melakukan gerakan sosial guna menciptakan perubahan sosial di lingkungannya.
- Menyelenggarakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan perubahan sosial.
- Memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensinya secara mandiri.

c. Jaringan Tambang (JATAM)

Jaringan Advokasi Tambang adalah jaringan organisasi non pemerintah (ornop) dan organisasi komunitas yang memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah HAM, gender, lingkungan hidup, masyarakat adat dan isu-isu keadilan sosial dalam industri pertambangan dan migas.

Indonesia tidak hanya menanggung praktek pertambangan yang destruktif di atas tanah dan sumber daya alamnya. Tetapi juga telah memiliki daftar panjang menyedihkan tentang pelanggaran HAM termasuk penggusuran paksa, hilangnya sumber kehidupan serta kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.

JATAM bekerja dengan masyarakat korban di banyak daerah di Indonesia yang dirusak oleh kegiatan pertambangan dan migas. Posisi dan tuntutan JATAM lahir dari keprihatinan terhadap penghancuran masiv lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat setempat akibat industri pertambangan dan migas. JATAM menemukan banyak fakta dilapang bahwa industri pertambangan mensejahterakan adalah mitos belaka.

Landasan JATAM adalah Pengelolaan secara adil dan bijak kekayaan tambang dan sumber energi hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat dan menjamin keberlanjutan keselamatan rakyat dan ekosistem kini dan masa depan”.

Filosofi dasar JATAM adalah terciptanya perlakuan yang adil dan keterlibatan bagi semua orang sejalan dengan hak-hak asasi manusia dan nilai-nilai

lingkungan hidup. Filosofi ini merupakan motivator utama dibalik semua kegiatan JATAM.

Kegiatan-kegiatan JATAM bertujuan untuk mewujudkan hak hidup masyarakat Indonesia di lingkungan yang sehat, produktif, bahagia, dan berkelanjutan. Dalam kegiatannya JATAM dibatasi oleh Etika dan Nilai-nilai Dasar JATAM.

Siapapun, baik individu atau kelompok yang bergerak memperjuangkan pengelolaan pertambangan dan energi lebih adil dan bijak kedepan, serta mendukung posisi JATAM, bisa terlibat dan mendukung kerja-kerja JATAM. Kerja-kerja JATAM dilakukan dalam bentuk pendampingan masyarakat korban, riset, pendidikan, kampanye penyadaran publik, advokasi kebijakan dan proses litigasi.

d. Gerakan Literasi Indonesia (GLI)

Gerakan Literasi Indonesia (GLI) adalah sebuah gerakan ekonomi, politik dan budaya yang diinisiasi oleh penulis, akademisi, seniman, pegiat LSM, dan mahasiswa yang memiliki kepedulian terhadap tumbuh dan berkembangnya kebudayaan Indonesia dalam arti seluas-luasnya. GLI berideologi Kedaulatan dan bersemangat kooperasi. GLI bersifat terbuka, mandiri, egaliter, majemuk, demokratis, progresif, dan revolusioner. Tujuan Gerakan Literasi Indonesia adalah terciptanya masyarakat Indonesia yang ‘melek’ ekonomi, politik dan budaya dan bertanggungjawab atas setiap pikiran dan tindakannya.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut GLI berorientasi pada usaha-usaha penyadaran terhadap kondisi riil masyarakat Indonesia yang masih mengalami

dominasi politik, ekonomi, dan kebudayaan dari kelompok-kelompok tertentu. Selain melakukan usaha penyadaran atas ketertindasan struktural dan kultural, gerakan ini juga berupaya mewujudkan perikehidupan yang setara, berdaulat, dan kreatif di seluruh lapisan masyarakat. Lingkup kegiatan GLI di antaranya aktif dan teratur mengadakan serial diskusi, mengadakan Bengkel Menulis dan Bengkel Jurnalistik, mendirikan dan membesarkan Kooperasi Litera, dan berinisiatif membangun media berbasis koperasi sebagai bukti konkret melawan oligarki dan konglomerasi media massa yang membuat pembacanya tak berdaulat.

Dalam mewujudkan cita-cita kedaulatan ekonomi, politik dan budaya bagi segenap lapisan masyarakat tersebut Gerakan Literasi Indonesia membentuk biro-biro kerja yang mewadahi semangat, arah dan tujuan gerakan. Ada empat biro kerja yang merupakan infrastruktur dan tulang punggung gerakan ini, yaitu:

- 1) Biro Penelitian dan Media,
- 2) Biro Pengorganisasian dan Jaringan,
- 3) Biro Aksi Budaya,
- 4) Biro Kedaulatan Ekonomi. Keempat biro ini bekerja sinergis satu sama lain untuk mencapai cita-cita dan tujuan Gerakan Literasi Indonesia.